



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STRATEGI MEDIA RELATIONS LEMBAGA TINGGI  
NEGARA DALAM MEMBANGUN KREDIBILITAS**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister sains**

**Hasanul kabri  
0606016312**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
MANAJEMEN KOMUNIKASI**

**JAKARTA  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan benar.

Nama : Hasanul Kabri

NPM : 0606016312

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 Juli 2009



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Hasanul Kabri  
NPM : 0606016312  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Komunikasi  
Judul Tesis : Strategi Media Relations Lembaga Tinggi Negara dalam  
Membangun Kredibilitas

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Eduard Lukman, MA  
Penguji Ahli : Ir. Firman Kurniawan, M.Si  
Ketua Sidang : Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D.  
Sekretaris Sidang : DR. Pinckey Triputra, M.Sc.



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 06 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan ridho dan rahmat-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Suatu proses yang panjang dan berat saya rasakan mengingat penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat dan salah satu kewajiban studi dalam jenjang memperoleh gelar Master Sains (M.Si) yang telah ditetapkan oleh Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada;

- (1) Drs. Eduard Lukman, MA., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Dedy N. Hidayat, Ph.D, selaku ketua program pascasarjana, manajemen komunikasi Universitas Indonesia dan para dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama mengikuti perkuliahan.
- (3) Drs. Suratna, M.Si, Kepala bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang telah memberikan keterangan detail mengenai aktivitas media relations di DPR RI.
- (4) Pihak – pihak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pengetahuan tambahan mengenai aktivitas media relations di DPR RI, diantaranya Saudara Djunaedi Suswanto, selaku Sekjen Koordinatoriat Wartawan DPR RI. Saudara Untung Sumarman, selaku wartawan media cetak. Saudara Sari, selaku wartawan media elektronik. Ibu Dra. Tri Hastuti, pegawai bagian Pemberitaan Setjen DPR RI.
- (5) Saudara Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. Peneliti Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi. Yang telah meluangkan waktu untuk memberikan penajaman pengetahuan mengenai media relations di DPR RI.
- (6) M. Saleh A. Samad dan Nuryani, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat dengan cinta mereka agar tesis ini terwujud.

- (7) Dra. Anita Ariyati, selaku Kepala Bidang Perpustakaan dan rekan-rekan di Bidang Perpustakaan selaku mitra kerja yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya selama penyelesaian tesis ini.
- (8) Rekan-rekan di Biro KSAP, Biro Humas dan Pemberitaan, terutama sekali rekan-rekan di Bagian Pemberitaan yang memberikan dukungan di dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penyelesaian penelitian ini.
- (9) Tidak lupa juga saya persembahkan ucapan terima kasih yang tulus kepada Mas Drajat, Nitta, Ipung, Reza, Mba Mita, Handrini, Mba Shinta, Rifki, Bang Ambia, Abi dan rekan-rekan angkatan 2006 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat.
- (10) Staf Administrasi Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia diantaranya Pak Tasyim, Mas Giri, Mas Mugi, Mas Agus. Mba Siti, Mas Ajat, Mba Ayu, Mas Yusuf, Mas Nadi, Pak Taram, dan Pak Barnas atas segala pengertian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
- (11) Saudara – saudara kandung saya tersayang yang tidal kenal lelah memberikan dorongan dan bantuan agar tesis ini terwujud. Dan juga keponakkan – keponakkan saya, Abyandar Hendarto, Achdan Hilmi, Nur Aulia Rahmah, Bahyyazid Ramadhan, Faiza Aqila Rahmah, Saniyah Latifa Ramadhani, dan Athira Syazana Amanina., yang dengan cinta kasih mereka memberikan dorongan semangat sehingga terwujudnya tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas segala budi baik dan senantiasa melimpahkan rachmat-Nya kepada mereka yang telah ikut berjasa dalam penyelesaian studi ini. Akhirnya saya mengharapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa yang berkenan membacanya.

Jakarta, Juli 2009

Penulis,  
Hasanul kabri

## ABSTRAK

Nama : Hasanul kabri

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul : Strategi Media Relations Lembaga Tinggi Negara dalam  
Membangun Kredibilitas

Tesis ini membahas tentang Strategi Humas DPR di dalam membangun kredibilitas DPR RI melalui media massa dengan mengelola relasi dan mengembangkan strategi, mengembangkan jaringan dengan media massa dan wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan DPR RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Humas DPR RI perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, terutama Sumber Daya Manusia di Bagian Pemberitaan, di dalam mengemas berbagai perbedaan informasi yang ada di Dewan menjadi satu informasi yang akan menjadi konsumsi media massa dan wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan DPR RI.

Kata Kunci:

Strategi dan Hubungan

## ABSTRACT

Name : Hasanul kabri  
Study Program : Communication Science  
Title : the Strategy of Media Relations to Develop the High State  
Institutions Credibility through Mass Media

The focus of this study is the strategy of media relations to develop the High State Institutions credibility through mass media, by managing relationship, establishing strategic, developing networking. The purpose of this study is to understand how media relations division manage relationship, and developing the strategy and expansion networking. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that Humas DPR RI must be enhancing human resources quality, especially in arranging any informations from various differences in DPR RI.

Key words:

Strategy, and relationship

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pernyataan Orisinalitas</b>	.....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b>	.....	iii
<b>Kata Pengantar</b>	.....	iv
<b>Abstrak</b>	.....	vi
<b>Daftar Isi</b>	.....	viii
<b>Daftar Tabel Dan Gambar</b>	.....	x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang masalah	1
	B. Perumusan Masalah	12
	C. Tujuan Penelitian	13
	D. Signifikansi Penelitian	14
	E. Sistematika penulisan	14
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA KONSEP</b>	
	A. Pengertian Komunikasi	15
	B. Pengertian Komunikasi Organisasi	20
	C. Birokrasi	27
	D. Hubungan Masyarakat	28
	E. Hubungan dengan Media dan Publisitas	30
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI</b>	
	A. Metode Penelitian	43
	B. Definisi konsep	43
	C. Subjek Penelitian	44
	D. Metode Pengumpulan Data Analisis Data Kualitatif	46
	E.	50
<b>BAB IV</b>	<b>Gambaran DPR RI DAN SETJEN DPR RI</b>	
	A Dewan Perwakilan Rakyat Penentu Sejarah bangsa Sekretariat Jenderal Dewan	51
	B.. Perwakilan Rakyat	56



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 : Gaya Komunikasi .....	29
Gambar 2.1: Proses Komunikasi .....	19
Gambar 4.1: Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI .....	66
Gambar 4.2: Struktur Organisasi Humas DPR RI .....	67



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai lembaga negara yang menampung dan mewujudkan aspirasi rakyat, mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis terutama dalam peningkatan dan pengembangan demokratisasi di Indonesia.

DPR mempunyai tiga fungsi utama, sebagai pengejawantahan dari *trias politica* yang salah satu pilarnya adalah lembaga legislatif. Ketiga fungsi tersebut adalah fungsi legislasi (pembuatan undang-undang), budget (anggaran), dan pengawasan. Ketiga fungsi utama itulah yang menjadi ukuran sesungguhnya dari kiprah DPR selama ini, dan menciptakan image di masyarakat. Selain itu juga, ditambah dengan moral personal anggota DPR sendiri dalam bersikap dan bertingkah laku di masyarakat.

Terkesan, sebagian besar anggota DPR tidak bersimpati terhadap kepentingan rakyat, dan lebih mementingkan kepentingan partai dan golongannya sendiri. Misalnya, mereka terlihat aktif saat membahas RUU pemilu, namun terkesan sepi saat membahas RUU dibidang lainnya, misalnya tentang kesehatan, hukum dan ekonomi rakyat. (FIGUR, Edisi XXVIII, 2008: 3)

Lebih jauh lagi, banyak hasil survei dan polling lembaga-lembaga survei terkenal yang menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR dibandingkan institusi-institusi non-negara seperti organisasi keagamaan dan

kebijakan-kebijakan yang dulunya lebih banyak menjadi ranah dan wewenang pemerintah.

Ada dua faktor yang menyebabkan kinerja lembaga DPR belum optimal, demikian menurut Koordinator Penelitian dan Advokasi FORMAPPI, Tommy A. Legowo, (Majalah FIGUR, 2008: 12) *pertama*, faktor internal yaitu dari parpol. *Track record* parpol yang kebanyakan menonjolkan figur ketua umum dan tergantung pada sekelompok elit. Proses rekrutmen, arah kebijakan kepada anggota DPR dalam peran keterwakilan rakyat juga tidak jelas. Fungsi fraksi di DPR lebih digunakan untuk memastikan agar anggota DPR melayani kepentingan elit partai, bukan untuk melayani kepentingan konstituen. Ditambah rendahnya kredibilitas simbol-simbol kehormatan DPR, yaitu pimpinan DPR, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan seperti Badan Kehormatan (BK), pimpinan komisi-komisi dan lainnya. *Kedua*, faktor eksternal yaitu proses Pemilu. Sampai saat ini rakyat melihat pemilu sebatas kegiatan memilih rutin lima tahunan. Atau hanya didasarkan pada kedekatan emosional dengan parpol tertentu, atau karena mendapat "keuntungan" dari calon tertentu. Sementara rakyat yang memilih karena mencari wakil rakyat yang meyakinkan dapat mewakili aspirasi mereka jumlahnya masih langka. Mayoritas rakyat lebih banyak memilih pada pertimbangan emosional bukan rasional.

Selanjutnya Tommy A. Legowo mengatakan bahwa penyelesaian Persoalan DPR dimulai dari proses politik, yang salah satunya adalah kekuasaan. Dalam hal ini harus dimulai dari sumbernya yaitu partai politik. Karena untuk membenahi parlemen harus dimulai dari parpol. Caranya dengan memaksimalkan pengaruh terhadap segelintir elit dari setiap parpol yang ada saat perumusan kebijakan dibuat. Sebab karakteristik parpol di Indonesia banyak ditentukan oleh individu atau segelintir elit. Masalahnya kebanyakan secara internal partai tidak ada yang berani melakukan. Untuk itu harus didorong dari pihak luar yaitu masyarakat lewat pendidikan politik tentang makna parpol buat mereka. Karena anggota DPR berasal dari parpol maka parpol harus

Ukuran kinerja organisasi pelayanan publik ada dua hal, produktivitas dan kualitas pelayanan. Untuk mengukur kinerja organisasi pelayanan publik, Lenvine dkk (dalam Dwiyanto, 1995), mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan dalam mengukur kinerja organisasi. Yakni:

1. Responsivitas.

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program layanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Responsibilitas.

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi yang baik.

3. Akuntabilitas.

Menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat dengan asumsi karena para pejabat politik itu telah dipilih oleh rakyat, mereka merepresentasikan kepentingan rakyat. (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 40)

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dan diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika pemerintah yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara

para wakil rakyat itu sendiri. Jadi bisa dibilang upaya pembangunan citra positif DPR terletak di atas pundak banyak pihak. Keunikan DPR juga terlihat dari pemisahan antara Bagian Humas dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan yang dulunya sempat menjadi satu. Jika di Departemen segala urusan yang terkait dengan pers itu ditangani oleh Bagian Humas, maka di DPR ditangani oleh Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Sementara Bagian Humas khusus berhubungan dengan delegasi masyarakat yang memang sering mendatangi rumah rakyat ini.

Bila Bagian Humas dapat berupaya meningkatkan citra positif dengan memberikan pelayanan prima untuk setiap delegasi masyarakat yang datang ke DPR, maka Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dapat meningkatkan upaya peningkatan citra yang positif tentang DPR melalui pemberitaan yang positif terkait dengan kinerja DPR.

Sesuai amanat pasal 99 UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR RI, DPR RI, DPR RI, dan DPRD RI, institusi yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR RI adalah Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Keberadaan Setjen DPR RI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden dan Peraturan Tata Tertib DPR RI, di mana dalam peraturan tersebut pada hakekatnya terdapat tiga unsur utama yang menentukan sistem pendukung yang ideal. Salah satu unsur tersebut adalah aspek komunikasi. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kelancaran tugas DPR RI.

Unit kerja yang tugas utamanya berkaitan dengan bidang komunikasi, yaitu menerima dan menyebarluaskan informasi kepada publik adalah Biro Humas dan pemberitaan, yang membawahi bagian pemberitaan, bagian humas, dan bagian protokol.

Karena itu seiring dengan upaya pembentukan citra positif tentang Dewan, diharapkan Bagian Pemberitaan lebih meningkatkan sosialisasi kegiatan dan hasil-hasil Dewan melalui pemberitaan di media massa maupun media internal yaitu bulletin dan majalah Parleментарia serta *home page* DPR RI. Kondisi tersebut belum lagi ditambah adanya wacana yang mengharapkan adanya kemunculan televisi parlemen yang tengah digodok usulannya di pucuk pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Seiring dengan munculnya wacana tersebut kemampuan pimpinan maupun staf terhadap jurnalisme melalui media elektronik diharapkan juga mencukupi.

Setidaknya ada tiga elemen atau *stake holder* penting yang harus diperhatikan dalam rangka membangun citra positif Dewan oleh *public relations* (Baik itu Humas maupun Pemberitaan) yaitu :

1. Pimpinan dan Anggota DPR RI
2. PERS
3. Masyarakat.

Mengingat luasnya jangkauan serta cakupan kerja *public relations* DPR RI yang melibatkan beberapa bagian sekaligus, para pimpinan Bagian terkait harus terlebih dulu merumuskan strategi kebijakan Pelaksanaan *public relations* untuk DPR RI sehingga target dan capai yang ingin diwujudkan dapat terinventarisir dengan baik. Selain itu strategi kebijakan tersebut dapat dijadikan suatu “buku putih” yang dapat dijadikan panduan para pimpinan dan staf lain yang terlibat dalam melaksanakan fungsi ke *public relations* an kepada DPR RI.

Bagaimana menghadapi realitas sosial yang memang menunjukkan kondisi tidak *confirmnya* DPR RI, Bagaimana Bagian Humas dan Pemberitaan harus menyikapi kondisi tersebut, langkah-langkah strategis apa yang seharusnya dilakukan, semuanya harus termuat dalam buku putih tersebut termasuk terobosan-terobosan yang bersifat strategis.

kemampuan berkomunikasi efektif dengan Pimpinan atau Anggota Dewan dimana dia ditugaskan.

2. Harus memiliki kemampuan "*How to manage issue*" dan "*How to making News by frame*" dan "*How to generate meaning*". Pola pemikiran tradisional tentang tugas pemberitaan yang hanya bertugas menulis berita di media internal harus dirubah. Pemberitaan harus mampu membuat DPR RI dapat lebih terlihat di media massa secara positif. Bagaimana caranya ? ya dengan *manage* dan membuat *framing* berita dari sisi Dewan dengan kemasan yang "dapat dijual" dan menunjukkan keberpihakan Dewan kepada rakyat. Seperti berita tentang pupuk beberapa waktu lalu. Pemberitaan harus mampu melihat "celah dan pangsa pasar" kapan dan momentum yang tepat untuk melansir pernyataan-pernyataan Dewan secara tepat dan sistematis.
3. Karena itu Pemberitaan harus mampu menguasai cara-cara penulisan berita yang ilmiah dan populer seperti di media massa umum layaknya khususnya Kompas, Media Indonesia. Pemberitaan juga harus mampu membaca *style* dan kekhususan dari masing-masing media.
4. Selain itu Pemberitaan juga harus menguasai masala-masalah yang terkait dengan Komisi dimana dia berada. Pemberitaan harus memiliki "Gudang Pengetahuan" yang setiap saat siap untuk diluncurkan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan di DPR RI perlu disosialisasikan melalui media massa, untuk itu perlu sekali hal tersebut dipublikasikan dengan menggandeng media massa.

Hubungan baik yang dibina oleh bagian pemberitan (MRO) DPR RI terhadap wartawan yang meliput di DPR RI dan pengurus koordinariat wartawan DPR RI adalah agar segala sesuatu yang menyangkut penyebaran informasi kepada publik eksternalnya berjalan lancar. Disamping itu apabila terdapat suatu informasi negatif yang merugikan lembaga DPR RI dalam

kasus – kasus buruk yang menohok lembaga DPR RI membuat penting sekali dalam bagian pemberitaan untuk mempunyai hubungan yang baik dengan para wartawan yang meliput di lingkungan DPR RI, baik media cetak, media elektronik, majalah maupun media online, dan pengurus Koordinatoriat wartawan DPR RI, yang mempunyai wewenang atas press room dan mengkoordinasi wartawan yang sudah terdata di bagian pemberitaan. Hubungan yang terjadi antara pegawai bagian pemberitaan dengan wartawan dan pengurus koordinatoriat wartawan DPR RI tadi tidak berarti bahwa pegawai bagian pemberitaan (MRO) itu harus mendapatkan pelayanan yang istimewa dari mereka. Hubungan yang terjadi harus dipelihara dan harus berdasarkan integritas profesi. Seorang pegawai bagian pemberitaan (MRO) harus memperlakukan semua media massa sama. Perlakuan yang berdasarkan *like and dislike* dalam memberikan informasi dapat menimbulkan antipati terhadap pegawai bagian pemberitaan. Meskipun sikap antipati itu tidak berdampak terhadap berita-berita yang dimuat di media massa. Karena wartawan itu di dalam memuat berita sesuai dengan visi dan misi mediana masing-masing.

Dikalangan wartawan ada yang menganggap bagian pemberitaan DPR RI sebagai bagian yang berusaha menutup-nutupi kesalahan organisasi, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kesekretariatan Jenderal DPR RI yang diwakilinya. Penilaian wartawan tersebut terjadi karena mereka sering menemukan kesulitan di dalam memperoleh informasi yang mereka sulit mendapatkannya. Selain itu pemberitaan negatif mengenai suatu lebih sering dimuat dibandingkan dengan berita positif. Karena menurut media berita negatif lebih mempunyai nilai berita (*news value*) daripada berita positif.

Wartawan sering pula menuduh bahwa bagian pemberitaan biasanya pilih kasih, jika ada kegiatan kunjungan kerja di mana menurut mereka pada saat kunjungan itulah banyak informasi yang penting untuk disampaikan kepada publik, sehingga hanya wartawan tertentu yang akan mendapat kesempatan



## D. Signifikansi Penelitian

### a. Signifikansi Akademis

penelitian ini mencoba melihat hubungan media dengan DPR dalam fokus penelitian terhadap strategi media relations yang meliputi mengelola relasi, mengembangkan strategi, mengembangkan jaringan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah khazanah kajian terhadap media relations.

### b. Signifikansi praktis

Penelitian yang melihat hubungan media dengan DPR dalam fokus penelitian terhadap strategi *media relations* yang meliputi mengelola relasi, mengembangkan strategi, mengembangkan jaringan, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan komunikasi kehumasan DPR di dalam berhubungan dengan media.

## E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan: Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kerangka Konsep: Pengertian Komunikasi, Komunikasi Organisasi, Birokrasi, Humas, Hubungan dengan media.

Bab III : Metodologi: Metode Penelitian, Definisi Konsep, Subjek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Analisis Data Kualitatif.

## BAB II

### KERANGKA KONSEP

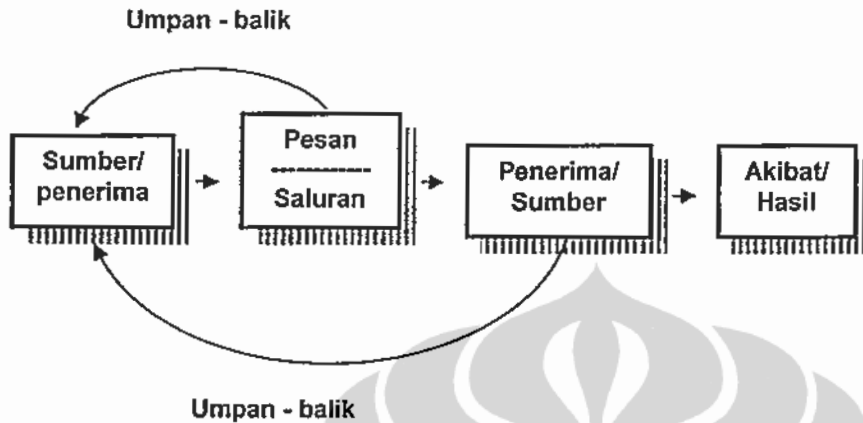
#### A. Pengertian Komunikasi

Dalam istilah yang sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian pengertian antarindividu. Semua masyarakat manusia dilandasi kapasitas manusia untuk menyampaikan maksud, hasrat, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman dari orang yang satu kepada orang lainnya. Pada pokoknya, komunikasi adalah pusat minat dari situasi perilaku di mana suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada seorang penerima dengan tujuan mempengaruhi perilaku si penerima. (H.Frazier Moore, Ph.d., 2004:86)

Sedangkan Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D mengatakan dalam Pengantar Ilmu Komunikasi (2005:1.18), bahwa yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan/atau diantara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Pengertian komunikasi mempunyai enam (6) karakteristik pokok sebagai berikut. Pertama, komunikasi adalah suatu proses. Kedua, komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Ketiga, komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku yang terlibat. Keempat, komunikasi bersifat simbolis. Kelima, komunikasi bersifat transaksional. Keenam, komunikasi menembus faktor waktu dan ruang.

Untuk memberikan gambaran bahwa komunikasi adalah suatu proses. Secara linier, proses komunikasi sedikitnya melibatkan empat (4) elemen atau komponen sebagai berikut,

Secara sederhana proses komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Proses komunikasi yang digambarkan tersebut dapat dijelaskan demikian: *pertama*, pihak sumber membentuk (*encode*) pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu. Pihak penerima kemudian mengartikan dan menginterpretasikan pesan tersebut. Apabila penerima punya tanggapan maka kemudian akan membentuk pesan dan menyampaikannya kembali kepada si sumber. Tanggapan yang disampaikan penerima pesan kepada sumber disebut sebagai umpan - balik. Pihak sumber kemudian akan mengartikan dan menginterpretasikan tanggapan tadi, dan kembali akan melakukan pembentukan dan penyampaian pesan baru. Demikianlah proses ini terus berlanjut secara sirkuler, di mana kedudukan sebagai sumber dan penerima berlaku secara bergantian (Sasa Djuarsa S., 2005, 2.4).

Hal ini berarti proses komunikasi akan berjalan baik, apabila antara sumber dan penerima pesan terdapat pertautan minat dan kepentingan (*overlapping of interest*). Pertautan minat dan kepentingan ini akan terjadi apabila terdapat persamaan (dalam tingkatan yang relatif) dalam hal kerangka referensi antara

menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan bersifat pribadi.

4. Komunikasi antarkelompok/asosiasi

Kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, atau antara suatu asosiasi dengan asosiasi lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi jenis ini boleh jadi hanya dua orang atau beberapa orang saja. Tetapi masing – masing membawakan peran dan kedudukannya sebagai wakil dari kelompok/asosiasinya masing – masing. Dengan demikian pesan yang disampaikan menyangkut kepentingan kelompok/asosiasi.

5. Komunikasi organisasi

Komunikasi organisasi mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Bedanya dengan komunikasi kelompok, bahwa sifat komunikasi organisasi lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip – prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Misalnya: pertemuan antara direksi perusahaan A dengan para manajernya, surat – menyurat antara perusahaan A dengan perusahaan B, atau pertemuan antara pimpinan perusahaan A dengan pimpinan departemen B.

6. Komunikasi dengan masyarakat secara luas

Pada tingkatan ini kegiatan komunikasi ditujukan kepada masyarakat secara luas. Bentuk kegiatan komunikasinya dapat dilakukan melalui dua cara:

- a. Komunikasi massa, yakni komunikasi melalui media massa seperti radio, majalah, surat kaba, dan TV;

sedang berusaha mencapai kesamaan makna, 'commonness'. Atau dengan ungkapan lain, melalui komunikasi kita mencoba berbagi informasi, gagasan atau sikap kita dengan partisipan lainnya.

Mengenai organisasi, salah satu definisi menyebutkan bahwa organisasi merupakan satu kumpulan atau sistem individual yang melalui satu hierarki jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan (*an organization is a collection, or system, of individuals who commonly, through a hierarchy and division of labor, seek to achieve a predetermined goal*).

Dari batasan tersebut dapat digambarkan, bahwa di dalam suatu organisasi mensyaratkan adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan semua individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang sangat jelas, seperti pimpinan, staf pimpinan dan karyawan. Di samping itu, dalam organisasi juga mensyaratkan adanya pembagian kerja, dalam arti setiap orang dalam sebuah Institusi baik yang komersial maupun sosial memiliki satu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (Sasa Djuarsa S., 1994: 132).

Dengan landasan konsep – konsep komunikasi dan organisasi tersebut, maka batasan tentang komunikasi organisasi, yaitu komunikasi antar – manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi. Atau dengan meminjam definisi dari Goldhaber, komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain (*the flow of messages within a network of interdependent relationships*) (Sasa Djuarsa S., 1994: 133).

Organisasi dipandang oleh Littlejohn sebagai mesin yang menghasilkan produk dan jasa, sebagai organisme yang lahir, tumbuh, dan beradaptasi dengan lingkungan, sebagai otak yang memiliki kepintaran dalam memproses informasi, mengkonseptualisasi, dan membuat rencana. Sebagai budaya karena mencipta

Menurut Pace & Faules, pendekatan objektif memandang organisasi sebagai sesuatu yang bersifat konkret dan merupakan sebuah struktur dengan batas-batas yang pasti. Istilah organisasi mengisyaratkan bahwa sesuatu yang nyata merangkum orang-orang, hubungan-hubungan, dan tujuan-tujuan. (2001:11)

Komunikasi organisasi dipandang dari sudut subjektif adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Proses interaksi tersebut tidak menceminkan organisasi, ia adalah upaya mengorganisasikan perilaku dalam organisasi. Singkatnya, komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa sedang terjadi. (Pace & Faules: 33)

Selanjut menurut Pace & Faules, bila organisasi dianggap sebagai suatu struktur atau wadah yang telah ada sebelumnya, maka komunikasi dapat dianggap sebagai 'suatu substansi nyata yang mengalir ke atas, ke bawah, dan ke samping dalam suatu wadah. (Putnam, 1983:39) Dalam pandangan itu, komunikasi berfungsi mencapai tujuan dari sistem organisasi. Fungsi-fungsi komunikasi lebih khusus meliputi pesan-pesan mengenai pekerjaan, pemeliharaan, motivasi, integrasi, dan inovasi. (Farace, Monge, & Russel, 1977:56-57) Komunikasi mendukung struktur organisasi dan adaptasinya dengan lingkungan. Bila organisasi merupakan pemroses informasi besar, maka maksud proses komunikasi adalah memperoleh informasi yang tepat bagi orang yang tepat pada saat yang tepat. Berdasarkan perspektif ini, komunikasi organisasi dapat dilihat sebagai proses mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan komunikasi yang memungkinkan organisasi berfungsi. (Farace, Monge & Russel, 1977:4)

menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi.

## 2. Gaya Komunikasi

Gaya komunikasi atau *communication style* akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana perilaku orang – orang dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindak berbagi informasi dan gagasan. Gaya komunikasi didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu (*a specialized set of interpersonal behaviors that are used in a given situation*) (Sasa Djuarsa S., 1994: 142).

Ada enam (6) gaya komunikasi, yaitu

- a. *The Controlling Style*, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang – orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau *one – way communicators*.
- b. *The Equalitarian Style*, aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. *The Equalitarian Style of communication* ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan – pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah (*two – way traffic of communication*).
- c. *The Structuring Style*, pengirim pesan (*sender*) lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi.

Relinquishing	Bersedia menerima gagasan orang lain	sikap untuk bertindak Mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain	singkat Mendukung pandangan orang lain
Withdrawal	Independen/berdiri sendiri	Menghindari Komunikasi	Mengalihkan persoalan

Sumber: Jerry W. Koehler, Karl W. E. Anatol, Ronald L. Applbaum: *Organizational Communication, Behavioral Perspectives*, hal. 48 (Sasa Djuarsa S., 1994: 146)

### C. Birokrasi

Sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya dikembangkan oleh Max Weber (1864-1920), birokrasi adalah bentuk organisasi kekuasaan yang sepenuhnya diserahkan kepada para pejabat resmi atau aparat pemerintah yang memiliki syarat technical skills (berkemampuan secara teknis melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya) bagi bekerjanya sistem administrasi pemerintahan. (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 3)

Bentuk atau model organisasi modern, birokrasi pada dasarnya memiliki elemen-elemen dasar yang sama dengan organisasi pada umumnya. Mintzberg (1983) menyebutkan lima macam elemen dasar yang ada pada setiap organisasi (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 5), yaitu:

1. The strategic apex (pucuk pimpinan) yang bertanggungjawab penuh atas jalannya organisasi.
2. The middle line (pimpinan pelaksana) yang menjembatani pucuk pimpinan dengan bawahan/pelaksana.



## **D. Hubungan Masyarakat**

### **1. Pengertian Hubungan Masyarakat**

*Webster's New World Dictionary* mendefinisikan humas sebagai “Hubungan dengan masyarakat luas, seperti melalui publisitas; khususnya fungsi-fungsi korporasi, organisasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan dirinya sendiri.” (H.Frazier Moore, Ph.d., 2004:6)

Definisi yang lebih spesifik yang menekankan tanggung jawab khususnya, diberikan oleh *Public Relations News*: “Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.” (H.Frazier Moore, Ph.d., 2004:6)

Definisi berikutnya, “Humas adalah suatu filsafat sosial dan manajemen yang dinyatakan dalam kebijaksanaan beserta pelaksanaannya, yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa-peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan publiknya, berusaha untuk memperoleh saling pengertian dan itikad baik. (H.Frazier Moore, Ph.d., 2004:6)

### **2. Empat Unsur Dasar Humas**

Humas terdiri dari empat unsur dasar. Pertama, humas merupakan filsafat manajemen yang bersifat sosial; kedua, humas adalah suatu pernyataan tentang filsafat tersebut dalam keputusan kebijaksanaan; ketiga, humas adalah tindakan akibat kebijaksanaan tersebut; dan keempat, humas merupakan komunikasi dua arah yang menunjang ke arah penciptaan kebijaksanaan ini kemudian menjelaskan, mengumumkan, mempertahankan, atau mempromosikan kepada

Komunikasi adalah tanggung jawab setiap karyawan suatu lembaga. komunikasi eksternal dengan khalayak sekitar adalah tanggung jawab para eksekutif dan para karyawan biasa. Kalau diberi informasi yang memadai, para karyawan merupakan media yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan publik. (H.Frazier Moore, Ph.d., 2004:101)

## **E. Hubungan dengan Media**

### **1. Pengertian Hubungan dengan media (media relations)**

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2001: 129) mengatakan, “hubungan adalah interaksi atau keterkaitan, pengaruh-mempengaruhi antara dua individu, kelompok, masyarakat, organisasi, lembaga, dan sistem dalam suatu lingkungan tertentu.”

Sedangkan mengenai hubungan baik, Kustadi Suhandang (1994: 24) berpendapat, bahwa hubungan yang harmonis dalam arti saling pengertian dan saling menguntungkan satu sama lain, suatu hubungan “take and give” antara kedua belah pihak sehingga terjalin suasana keakraban yang favorable diantara perusahaan/organisasi dengan publiknya itu. Suasana yang mendorong ke arah majunya perusahaan/organisasi atau badan yang bersangkutan.

Media berita menjadi faktor utama dalam humas, yang mengontrol arus publisitas melalui saluran-saluran komunikasi umum, yang amat penting. Hubungan baik dengan para redaktur, reporter, penulis editorial, juru kamera, kolumnis, dan para penyiar serta pemahaman tentang kebutuhan mereka sangat esensial dalam menjamin pelaksanaan publisitas yang baik. Hubungan dengan media (*media relations*), yang semula merupakan hubungan sederhana antara petugas humas dengan beberapa rekan redaktur, telah menjadi semakin kompleks, karena meningkatnya jumlah media, karena media-media itu juga

dan apa yang tidak penting, serta berbagai pertimbangan. (H.Frazier Moore, Ph.d., 2004:216).

Dari beberapa pendapat H.Frazier Moore mengenai hubungan dengan media tersebut di atas dipahami bahwa salah satu kegiatan humas yang penting adalah menjalin hubungan baik dengan para redaktur, penerbit, penulis tajuk, rencana, kolumnis, dan para penyiar berita dalam pembentukan pendapat khalayak.

Mengenai hubungan humas dengan media, Frank Jefkins (1996: 98) mengungkapkan "hubungan dengan media" adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan."

Pernyataan Frank Jefkins mengenai hubungan media dengan media tersebut di atas, dapat dipahami dua hal pertama, bahwa hubungan dengan media ternyata tidak hanya kalangan media cetak saja, akan tetapi juga media lainnya, seperti media elektronik, dan sebagainya. Kedua, bahwa tujuan pokok diadakannya hubungan media adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman.

Dalam hal sasaran hubungan dengan media (media relations), Wisaksono Nuradi (dalam Rachmadi, 1992:56), menyebutkan lima sasaran, yakni:

- a. Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah organisasi/perusahaan yang dianggap baik untuk diketahui publik.
- b. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan, ulasan, dan tajuk yang wajar, objektif serta seimbang mengenai hal-hal yang menguntungkan organisasi/perusahaan.

kredibilitas pewawancara. Saat wawancara perlu diadakan dokumentasi audio (perekam) agar bisa dijadikan sumber check and recheck pada saat hasil wawancara itu dimuat dan terdapat kesalahan yang harus diralat.

Sementara itu *press release* adalah siaran pers yang berisi keterangan resmi dari organisasi/perusahaan mengenai produk, layanan, kebijakan maupun hal lain yang menyangkut perkembangan organisasi/perusahaan. Karena *press release* ini merupakan sumber berita bagi wartawan, maka ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman teknis dalam penulisannya, yaitu: informasi dalam *press release* haruslah menarik publik, mempunyai nilai berita (*news value*) yang tinggi, memenuhi kepentingan media, dan disusun berdasarkan fakta dan data yang akurat.

Konferensi pers merupakan bentuk paling formal dalam interaksi dengan media, dan ini diadakan hanya bila ada peristiwa yang luar biasa saja. Konferensi pers dapat diselenggarakan atas inisiatif organisasi/perusahaan, ataupun juga karena permintaan pihak media. Sedangkan *press tour* merupakan aktivitas yang diselenggarakan organisasi/perusahaan yang membuka kesempatan untuk penyebaran informasi yang menyangkut berbagai hal sekaligus.

Memahami dan melayani media berarti mengenal benar cara kerja media, bentuk-bentuk media, frekuensi penerbitan, ciri-ciri berita dan lain-lain. Dengan mengenal dan memahaminya, maka praktisi humas akan mampu menjalin kerja sama yang baik dengan pihak media dan akan mampu menciptakan media relations yang saling menguntungkan. Bagaimanapun juga humas yang berhasil adalah humas yang mampu menjalin hubungan baik dengan media. Karena hampir 50% aktivitas humas adalah berhubungan dengan media. Hubungan tersebut tidaklah diartikan bahwa hanya media membutuhkan humas, tetapi sebaliknya humas juga membutuhkan media. Jadi agar tercipta hubungan baik, memahami serta melayani apa kebutuhan media menjadi hal yang utama.

berita yang aktual dan akurat. Dengan demikian maka berita-berita dari perusahaan/organisasi di mana praktisi humas itu bekerja akan selalu aktual dan akurat sehingga sangat disukai untuk menjadi berita oleh media.

Praktisi humas harus berupaya untuk membangun hubungan personal yang kokoh. Ini merupakan suatu hubungan yang positif yang hanya akan tercipta bila dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, kerja sama dan sikap saling menghormati profesi masing-masing. Hubungan yang baik tentulah akan berimplikasi pada berita yang baik pula. Tetapi dengan hubungan personal yang buruk, berita yang baikpun bisa menjadi buruk.

Sementara itu Brad Fitch (2004: 67) menyebutkan 13 aturan main yang harus dipatuhi praktisi humas dalam melakukan aktivitas hubungan dengan media (*media relations*)nya. Ke-13 aturan main yang disebut *thirteen rule of media relations* itu adalah:

- a. Tidak pernah bohong, memalsukan, mengaburkan, menyesatkan, dengan sengaja mengubah keterangan, dengan sengaja melakukan kegiatan lain yang akan merusak sikap saling percaya dengan media. Kredibilitas merupakan kunci dalam media relations.
- b. Jangan pernah menilai rendah media. Gagasan yang sederhana dan penyampaian yang baik akan mendapat perhatian, keterampilan yang dimiliki seorang juru bicara akan sangat menarik dibanding hanya sekumpulan pernyataan sebuah kebijakan.
- c. Terkadang anda dipersalahkan atas sesuatu yang bukan merupakan kesalahan anda, dan kadang anda mendapat pujian untuk hal yang tidak anda kerjakan. Ingatlah, ini adalah bidang yang keras. Banyak hal yang di luar kendli anda.
- d. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang anda tidak lihat. Jangan pernah berbicara kepada media kecuali sebelumnya telah dipikirkan secara hati-hati komentar atau pembicaraan anda kepada mereka.

Pilar kedua, buatlah ide orisinal. Dengan ide baru yang orisinal, maka apa yang diungkapkan melalui media akan menjadi berita aktual yang sangat disukai pembacanya. Pilar ketiga adalah katakan dengan benar (*tell the truth*). Jangan sekali-kali praktisi humas membuat pernyataan yang palsu. Media tidak akan lagi mempercayainya sebagai sumber berita yang baik dan jujur.

Chester burger, mantan reporter berita CBS, yang dikutip oleh Cutlip, menawarkan beberapa pedoman untuk bekerja sama dengan media. Pedoman itu adalah:

- a. Bicaralah dari sudut pandang kepentingan publik, bukan kepentingan organisasi/perusahaan.
- b. Buatlah berita itu mudah dibaca dan digunakan.
- c. Jika tidak ingin sesuatu pernyataan dikutip, jangan membuatnya. Hindari perkataan *off the record*.
- d. Nyatakan fakta paling penting di bagian awal.
- e. Jangan berdebat dengan media.
- f. Sampaikan kebenaran, meskipun kebenaran itu menyakitkan.
- g. Jangan menyelenggarakan konferensi pers kecuali memiliki apa yang media anggap sebagai bahan berita. (Cutlip, 2000:259)

Dari penjelasan berbagai jenis aktivitas *media relations* di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar dari aktivitas media relations adalah kejujuran. Melalui kejujuran para praktisi humas hendaknya membangun hubungan dengan media.

Dalam aktivitas peliputan kegiatan, acara apapun bisa diliput oleh media sepanjang mempunyai nilai berita. Jika suatu acara terlampau sederhana dan tidak ada sesuatu yang istimewa karena rutin diselenggarakan, sebenarnya tidaklah perlu mengundang media. Karena di mata media, kegiatan tersebut tidak mendapat tempat untuk diberitakan. Media hanya tertarik dengan sebuah peristiwa yang mempunyai nilai berita.

Robins dalam Erliana Hasan (2005: 43) mendefinisikan strategi sebagai penentu tujuan jangka panjang dan sasaran suatu organisasi.

Menurut Siagian (1986: 16), strategi adalah cara yang terbaik untuk mempergunakan dana, daya, dan peralatan yang tersedia untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi dalam pengertian di sini adalah bagaimana melaksanakan suatu kegiatan secara efektif kaitannya dengan taktik operasional yang mempunyai orientasi efisien. Sedangkan Ruslan (2000: 31) mengemukakan bahwa strategi pada hakekatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya. Pandangan lain mengemukakan bahwa strategi merupakan model perencanaan yang secara eksplisit dikembangkan oleh para manajer dengan mengidentifikasi arah tujuan, kemudian mengembangkan rencana tersebut secara sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan.

Pengertian strategi menurut M. Wayne De Lozier (1976: 6) adalah seni mendistribusikan dan menggunakan cara – cara militer atau cara – cara bisnis guna memenuhi tujuan akhir dari suatu kebijakan atau seni dan pengetahuan yang diakui dan mengkoordinasikan sumber – sumber dalam upaya mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian strategi adalah seni yang menyangkut berbagai cara dan upaya dengan mengelola dan mengkoordinir sumber – sumber yang ada guna mencapai tujuan tertentu.

Tujuan strategi komunikasi menurut Pace, Peterson, dan Burnet dalam Ruslan (2000: 31) dapat dijabarkan, yaitu

- a. *To secure understanding*, untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam komunikasi,

Banyak ahli dan praktisi humas yang menyatakan bahwa inti kegiatan humas adalah komunikasi dan relasi. Kegiatan komunikasi dan menjalin relasi dengan publik itulah yang sering disebut sebagai “roh” kegiatan humas. (Y.Iriantara, 2005: 80)

Di dalam mengembangkan media relations, hal yang perlu diperhatikan adalah mengelola relasi dengan media. Baik dengan media sebagai institusi maupun individu wartawan sebagai personifikasi media massa sama pentingnya. Karena dalam praktik humas, ada kalanya kita membutuhkan hubungan yang baik dan akrab dengan wartawan. Namun pada kali lain juga dibutuhkan hubungan yang baik dengan media massa. (Y.Iriantara, 2005: 82)

Setelah relasi dengan media massa terjalin dan terpelihara dengan baik, maka prasyarat untuk melaksanakan strategi *media relations* organisasi sudah tersedia. Strategi ini pada dasarnya adalah strategi untuk berkomunikasi dengan publik-publik yang menjadi khalayak sasaran kegiatan komunikasi dan relasi.

Strategi pada dasarnya merupakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah taktik untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. (Y.Iriantara, 2005: 89)



yang sudah ditetapkan. Ada pula Yang menyebut strategi sebagai rencana dan memberi Penjelasan atas metode yang dipakai untuk mencapai tujuan Yang sudah ditetapkan. Karena itu, maka strategi media relations merupakan sekumpulan kebijakan dan taktik yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan kegiatan media relations khususnya dan PR pada umumnya yang tentunya diacukan pada tujuan organisasi.

### C. Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di DPR RI di Senayan, Jakarta. Pilihan terhadap lokasi ini dilakukan mengingat lembaga ini adalah pusat kegiatan politisi yang duduk sebagai wakil rakyat. Alasan lainnya adalah bahwa citra atau reputasi yang baik merupakan aset sangat penting. Bila DPR RI sangat baik reputasinya, maka peneliti, sebagai karyawan Sekretariat Jenderal DPR RI pun akan bangga bekerja di DPR RI.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Penentuan key informan dan informan ditentukan berdasarkan:

1. intensitas hubungan dengan humas, terutama bagian pemberitaan DPR. Dengan intensitas pertemuan lebih banyak, maka diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas media relations.
2. yang telah meliput di DPR dua (2) tahun. Karena masa dua tahun sudah dapat dianggap mengenal prilaku kehumasan DPR.

Informan pokok dalam penelitian ini adalah wartawan yang tergabung dalam koordinatoriat wartawan DPR, pengurus koordinatoriat wartawan DPR, dan pejabat atau pegawai bagian pemberitaan. Untuk menjaga etika ilmiah, maka

peneliti juga dapat memberikan saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan” selanjutnya mengenai informan dikatakan “para responden yang mempunyai informasi dapat memberi keterangan-keterangan penting dengan baik ke dalam situasi yang berkaitan”

Informan pokok dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposif, karena tidak adanya kerangka sampling dari seluruh unsur – unsur yang terdapat dalam populasi tersebut. Dari sini informan pokok, sebagai subjek penelitian akan dipilih secara purposif sesuai dengan keperluan karena yang digali dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi, bukan kuantitas informan.

Wawancara terhadap semua informan dilakukan di DPR RI, di sela – sela waktu istirahat, di Kantor Berita ANTARA dalam suasana santai, bersahabat dan jauh dari kesan formal

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. ( Lofland dan Lofland, 1984: 47 ) berkaitan dengan hal itu maka data dapat dipisahkan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Data:**

- a. Data primer: merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya (data sumber utama). Sumber data utama dapat dicatat melalui perekaman video audio, audio tapes, pengambilan foto, atau film. Dalam penelitian ini sumber data primer dicatat dengan audio tape.

dengan Tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mengamati gejala-gejala yang tidak tertangkap dengan teknik lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam ( in-depth interview ) terhadap informan, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.

Teknik ini digunakan karena mempunyai sejumlah kelebihan antara lain: dapat digunakan untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, informan lebih meyakinkan di dalam menafsirkan pertanyaan dengan benar, memberikan kemungkinan terbesar atas keluwesan dalam proses pengajuan pertanyaan, banyak pengendalian yang dapat dilatih dalam konteks pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan, informasi dapat lebih siap diperiksa kesahihannya atas dasar isyarat non verbal. ( Black dan Champion, 1992 )

### 3. Menggali Data tentang hubungan media dengan DPR RI

Teknik penelitian ini terutama adalah observasi dan wawancara. Observasi partisipan secara terbatas dilakukan sebelum dan pada saat mengumpulkan data. Dalam pengamatan ini peneliti melakukan pencatatan mengenai aktivitas wartawan koordinatoriat DPR dan aktivitas bagian pemberitaan DPR.

Observasi partisipan atau pengamatan berperan serta potensial untuk memperoleh data yang lengkap, namun kendalanya adalah kekurangpekaan peneliti terhadap obyek penelitian.

Selama observasi partisipan peneliti juga melakukan *entri*. Menurut Baker (1994: 246): "*Entri* perlu dilakukan untuk menempatkan diri peneliti sebagai instrumen penelitian ke dalam situasi, yang dalam peranannya

kepercayaan. *Rapport* adalah kepercayaan dan kepercayaan adalah visi untuk memasuki dunia responden agar ia mau mengungkapkan kepada peneliti dengan perasaan nyaman untuk semua informasi yang diperlukan (Alwasilah, 2002: 144 – 145).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendalam (*Depth interview*). Menurut Rachmat Kriyantono, wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang – ulang) secara intensif.

#### **E. Analisis Data Kualitatif**

Analisis data dalam pendekatan kualitatif – konstruktivis didahului oleh upaya mengungkap *trustworthiness* dari para subjek penelitian. Yaitu menguji kebenaran dan kejujuran subjek penelitian dalam mengungkap realitas. *Trustworthiness* ini diuji melalui pengujian: *credibility* subjek, dengan menguji jawaban – jawaban pertanyaan berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai hubungan media dengan DPR RI (kajian strategi media relations DPR). Berikutnya adalah menguji *authenticity*, yaitu peneliti memberi kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi personal yang lebih detail, sehingga memengaruhi mudahnya pemahaman yang lebih mendalam. Dalam hal ini peneliti memberi peluang subjek, bila informan berasal dari wartawan koordinatiorat DPR untuk bercerita panjang lebar tentang apa yang dialaminya selama berhubungan dengan bagian pemberitaan DPR, dan subjek, bila informan berasal dari bagian pemberitaan DPR, untuk bercerita panjang lebar tentang apa yang dialaminya selama berhubungan dengan wartawan koordinatiorat wartawan DPR, dalam konteks wawancara yang informal dan santai.

## BAB IV

### GAMBARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

#### A. DPR RI Penentu Sejarah Bangsa

Daftar Sejarah DPR RI dapat ditelusuri sejak penjajahan Belanda. Pada masa itu, terdapat lembaga semacam parlemen bernama *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang dibentuk pada tahun 1918 oleh Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg Stirum. Lembaga ini dianggap sekadar basa basi politik pemerintahan kolonial. Namun, keberadaannya dirasakan bermanfaat bagi *the founding father* yang beraliran nasionalis moderat, seperti Mohammad Husni Thamrin yang menjadikannya sebagai sarana untuk mencapai Indonesia merdeka.

Susunan dan komposisi *Volksraad* periode pertama (1918) beranggotakan 39 orang termasuk Ketua, dengan komposisi orang Indonesia asih berjumlah 15 anggota (10 orang dipilih oleh "Wali Pemilili" dan 5 orang diangkat oleh Gubernur Jenderal). Sisanya, berjumlah 23 orang mewakili golongan Eropa dan Timur Asing, melalui pemilihan dan pengangkatan oleh Gubernur Jenderal (9 orang dipilih dan 14 orang lainnya diangkat). Sedangkan pada periode berikutnya di tahun 1927, komposisinya terdiri dari 1 orang ketua (diangkat oleh Kerajaan Belanda) dan 55 orang anggota (bumiputra hanya berjumlah 25 orang). Tahun 1930, komposisinya sama hanya jumlah anggotanya bertambah menjadi 60 (bumiputra hanya 30 orang).

(KNIP) oleh Presiden pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP

(29 Agustus 1945) dijadikan sebagai hari lahirnya DPR RI.

Dalam sidang KNIP yang pertama tersusun pimpinannya, yaitu: Ketua, Mr. Kasman Singodimedjo; Wakil Ketua I, Mr. Sutardjo Kartohadikusumo; Wakil Ketua II, J. Latuharhary; dan Wakil Ketua III, Adam Malik. Anggotanya berjumlah 60 orang. KNIP sempat bersidang sebanyak 6 kali.

Di masa Republik Indonesia Serikat (RIS), badan legislatif dibagi menjadi 2 kamar, yaitu Senat dan DPR yang beranggota 146 orang, mewakili negara bagian. Lembaga ini melaksanakan pembuatan perundang-undangan bersama pemerintah, juga berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat. Namun para menteri harus bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Di samping itu, DPR-RIS juga memiliki hak bertanya dan menyelidik. Selama masa kerjanya 6 bulan, DPR-RIS berhasil mensahkan 7 buah UU. Sedangkan, keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing 2 anggota dari tiap negara bagian. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat RIS.

Tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1950, LN No. 56/1950). Sehari kemudian, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat untuk membubarkan negara RIS dan pembentukan NKRI dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS (1950-1956) adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari Negara RI Yogyakarta. Menurut UUDS, DPR dapat menjatuhkan kabinet dan presiden berhak membubarkan DPR. Selama DPRS bekerja telah menyelesaikan

Setelah mengalami pengunduran dua kali, pemerintahan Orde Baru (Orba) berhasil menyelenggarakan pemilu pertama dalam masa pemerintahannya di tahun 1971. Seharusnya pemilu diselenggarakan tahun 1968. Ketetapan ini diubah pada Sidang Umum MPRS 1967 oleh Soeharto yang menetapkan pemilu diselenggarakan tahun 1971.

Untuk menetapkan jatah kursi di dalam parlemen, carayang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Pemilu 1971 menggunakan UU No. 15 Tahun 1969, yaitu semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan (sistem proporsional). Cara ini ternyata menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Sistem ini dipertahankan dalam enam kali pemilu di masa Orba, yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sejak awal pemerintahannya, rezim Orba sudah menunjukkan penyimpangan demokrasi. Pada Pemilu 1977, jumlah peserta pemilu dibatasi menjadi dua partai dan satu golongan karya (Golkar). Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-partai yang ada sebelumnya dipaksa melakukan penggabungan (fusi) ke dalam dua partai tersebut. Sementara mesin-mesin politik Orba tergabung dalam Golkar. Hal ini diakomodasi dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Keadaan ini berlangsung terus dalam lima kali pemilu berikutnya. Setiap pemilu tersebut, Golkar selalu keluar sebagai pemegang suara terbanyak.

Pada 7 Juni 1999, pemilu untuk memilih anggota legislatif dilaksanakan, yang terlebih dulu mengubah UU tentang Partai Politik (Parpol), UU Pemilihan Umum, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk). Tujuannya mengganti sistem pemilu ke arah yang lebih demokratis. Maka terpilihlah DPR periode 1999-2004.

tingkat perkembangan demokrasi dapat dilihat sejauhmana DPR telah dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Konstitusi mengamanatkan DPR memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 20 A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Berbeda dengan DPR sebagai lembaga negara yang para anggotanya menyanggah jabatan politik, Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang memiliki jabatan birokratis. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2003, Sekretariat Jenderal merupakan lembaga pemerintah yang memberikan dukungan kepada DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

#### 1. Visi dan Misi

Penangan kehumasan di Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan oleh Biro Humas dan Pemberitaan. Landasan hukum penyelenggaraan kehumasan di DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- c. Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/tahun 2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.
- d. Berbagai Keputusan Rapat Pimpinan BURT, Tim Kerja, dan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Fraksi-Fraksi.
- e. SK Sekjen DPR RI No. 400/Setjen/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Setjen DPR RI.



- Pemberian hasil kajian.
  - Penyediaan tenaga ahli.
  - Penyediaan asisten anggota.
  - Penyediaan perpustakaan.
  - Penyediaan dokumentasi.
- c. Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan wewenang DPR RI.
- d. Peningkatkan kualitas pelayanan aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- e. Peningkatkan kualitas kinerja pegawai.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Untuk melaksanakan visi dan misi maka dirumuskan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dukungan teknis dan administratif kepada DPR RI dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Meningkatkan kualitas dukungan keahlian dalam menyediakan informasi yang akurat sebagai bahan masukan kepada DPR RI.
- c. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan wewenang DPR RI.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu :

- a. Tersusunnya naskah akademik RUU.
- b. Tersusunnya draf awal RUU yang dapat dijadikan sebagai bahan usulan kepada Dewan.
- c. Tersusunnya analisis/kajian RAPBN yang dapat dijadikan sebagai bahan usulan kepada Dewan.

pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki Dewan. Oleh sebab itu pula, Sekretariat Jenderal DPR RI senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dijalankan agar dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Melalui tugas-tugas pokok tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan tiga fungsi, yaitu:

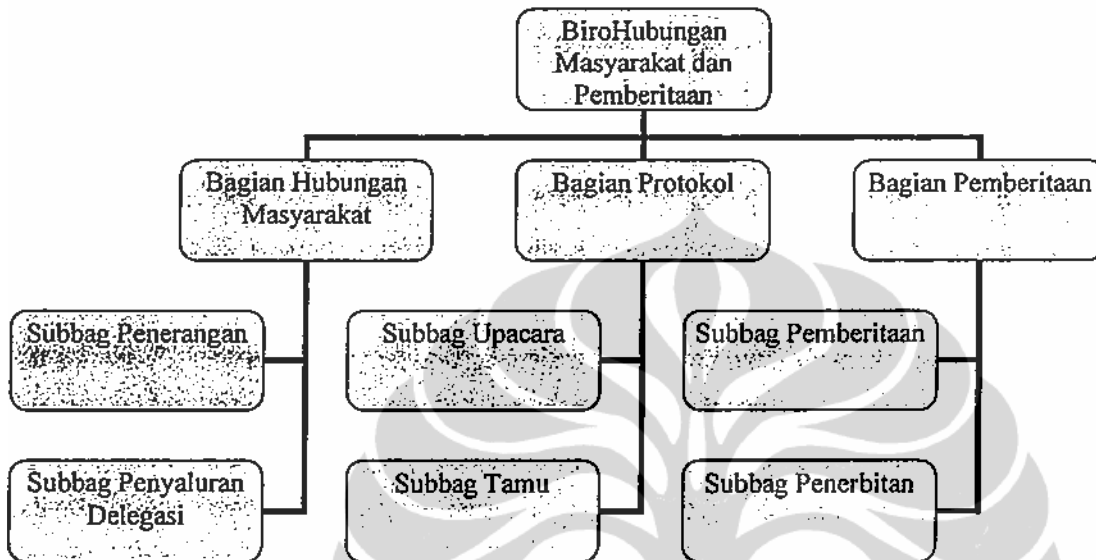
- a. Pelaksanaan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b. Pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR RI;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR-RI.

### **3. Struktur organisasi**

Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI dibantu 4 (empat) deputi bidang, yaitu:

- a. Deputi Bidang Perundang-Undangan;
- b. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan;
- c. Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama antar Parlemen; dan
- d. Deputi Bidang Administrasi.

Adapun struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2

#### 4. Biro Humas Dan Pemberitaan

Biro hubungan masyarakat dan pemberitaan terdiri dari bagian hubungan masyarakat, bagian protkol, dan bagian pemberitaan. Sasaran utama pelaksanaan kehumasan Setjen DPR adalah:

1. Terbangunnya komunikasi dua arah antara DPR dengan masyarakat
2. Terisolasinya pelaksanaan tugas dan fungsi DPR secara intensif melalui media internal (majalah parlementaria, buletin parlementaria, website DPR, TV parlemen) dan media eksternal atau media massa umum.
3. Terciptanya citra DPR yang kondusif di masyarakat .

4. Membuat press release / berita seputar DPR dan setjen DPR yang ditayangkan di situs dpr.go.id.
5. Mengurus jumpa pers
6. Mengkoordinir wartawan peliput kepada kegiatan dewan dengan memberi kartu tanda peliputan di gedung DPR
7. Menerbitkan majalah dan bulletin parlementaria
8. Menyiapkan dan mendistribusikan jadwal kegiatan DPR s
9. Mengurus peliputan melalui media cetak maupun media elektronik tentang kegiatan DPR dan Setjen DPR
10. Menyiapkan media cetak maupun media elektronik untuk mensosialisasikan kegiatan dewan
11. Menyelenggarakan dialog atau talkshow melalui media TV nasional serta radio mengenai kegiatan DPR.

Aktivitas kehumasan yang diatur dalam Tatib DPR merupakan implementasi komunikasi dua arah yang dilakukan DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Menurut Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR tahun 2006, terdapat berbagai aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki/dihadapi Biro Humas dan Pemberitaan DPR dalam membangun citra lembaga DPR, sejalan dengan pengembangan lembaga kehumasan DPR.

Kekuatan yang ada yaitu: pertama, Biro humas dan pemberitaan telah terlembaga menjadi salah satu unit kerja di dalam struktur organisasi sekretariat jenderal DPR. Kedua, aktivitas Biro humas dan pemberitaan DPR didukung oleh anggaran yang disediakan APBN.

Sementara itu, kelemahan Biro humas dan pemberitaan DPR , yaitu pertama, karakteristik lembaga DPR sebagai lembaga politik yang di dalamnya terdiri fraksi – fraksi sebagai pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Konsekuensinya, kebijakan komunikasi

## BAB V

### STRATEGI MEDIA RELATIONS LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM MEMBANGUN KREDIBILITAS

#### A. Hasil Penelitian

Penyusunan hasil penelitian mengenai Kegiatan Media Relations DPR diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, yaitu sebagai Informan pokok adalah Kepala bagian pemberitaan DPR, satu (1) orang pengurus Koordinatoriat wartawan DPR, satu (1) orang pegawai bagian pemberitaan, tiga (2) orang wartawan, yang terdiri dari dua (1) orang wartawan media cetak, dan satu (1) orang wartawan media elektronik. Sedangkan sebagai key informan adalah Peneliti Komunikasi Politik P3DI Setjen DPR. Key informan di sini sebagai tempat untuk mengcross-check jawaban subjek.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara kualitatif kemudian laporan hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif dan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal yang berkaitan dengan Strategi Media Relations, bagaimana Bagian Pemberitaan DPR menjalin dan membina hubungan dengan wartawan koordinatoriat DPR.

Mengenai perolehan data dari Bagian Pemberitaan, tidaklah menjadi masalah. Karena kepala bagian dan kepala subbagian pemberitaan DPR tidaklah begitu sulit untuk ditemui dan mudah dihubungi, sedangkan untuk memilih wakil dari wartawan koordinatoriat DPR cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Karena selain kerja mereka tidak hanya berada pada satu tempat, karena sumber informasi bagi mereka tersebar dan banyak, juga tidak banyak dari mereka yang

Sedangkan di dalam membina hubungan dengan media massa dan wartawan memerlukan strategi. Menurut Yosol Iriantara di dalam bukunya yang berjudul *Media Relations* bahwa:

Strategi yang umum yang digunakan dalam praktik media relations adalah menjalin hubungan baik dengan media massa dan wartawan. Baik wartawan maupun media massa sama pentingnya bagi organisasi untuk menjalin komunikasi dan relasi dengan publik sarannya (Yosal Iriantara, 2005:80)

Lebih lanjut Yosol Iriantara mengatakan,

Menjalin relasi antara organisasi dengan media massa pun bisa dibangun berdasarkan hubungan antara manusia. PRO adalah manusia dan wartawan yang mewakili media massa pun manusia. Hubungan antarmanusia yang sifatnya pribadi dan seolah lepas dari hubungan tugas atau hubungan kerja bisa dibangun (2005: 88).

Sedangkan Kustadi Suhandang (1994: 24) mengenai hubungan baik berpendapat,

Hubungan yang harmonis dalam arti saling pengertian dan saling menguntungkan satu sama lain, suatu hubungan "take and give" antara kedua belah pihak sehingga terjalin suasana keakraban yang favorable diantara perusahaan dengan publiknya itu. Suasana yang mendorong kearah majunya perusahaan atau badan yang bersangkutan (Aan Setiadarma, 2002: 30).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, kesimpulan yang dapat disampaikan adalah bahwa hubungan dengan media massa dan wartawan itu dapat tercipta bila interaksi, atau keterkaitan, pengaruh antara organisasi dengan media massa dan wartawan yang didasarkan hubungan antarmanusia yang saling pengertian dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak sehingga terjalin suasana keakraban yang favorable.

massa, yaitu berkoordinasi untuk melakukan kerja sama dengan wartawan koordinatoriat DPR di dalam mengadakan konferensi pers, lalu memonitor terhadap perkembangan pembahasan tugas dan fungsi dewan, baik masalah legislasi, masalah budgeting maupun masalah kontrol, yang kemudian untuk diadakan konferensi pers.

Namun demikian, Informan 1 juga mengakui bila masih adanya kelemahan terhadap materi – materi yang disiapkan oleh sekretariat alat kelengkapan dewan, sehingga membuat bagian pemberitaan tidak dapat memenuhi kebutuhan wartawan akan informasi. Menurut Informan 1, yang menjadi kelemahan bagiannya adalah isi berita. Seperti yang dikeluhkannya sebagai berikut:

“Jadi setiap kali ada permintaan konferensi pers pada alat – alat kelengkapan dewan, kita berkonsultasi dengan wartawan, selain itu juga kita arrange secara khusus karena kita sadari betul bahwa kelemahan pemberitaan selama ini adalah kurangnya sosialisasi atau kurangnya materi – materi yang disiapkan oleh alat kelengkapan dewan untuk media. Jadi kelemahan kita terhadap isi berita.”

Dari pernyataan Informan 1 tersebut di atas, tergambar bahwa selain isi berita yang menjadi kelemahan bagian pemberitaan, yang dikarenakan kurangnya materi – materi yang dipersiapkan oleh sekretariat alat kelengkapan dewan, juga pada kenyataannya bagian pemberitaan juga menjadi kurang dapat menjalankan kewajibannya, yaitu mensosialisasikan kegiatan alat kelengkapan dewan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa komunikasi antara sekretariat alat kelengkapan dewan dan bagian pemberitaan tidak berjalan baik, sehingga mempengaruhi hubungan bagian pemberitaan dengan wartawan koordinatoriat DPR. Karena dengan terganggunya komunikasi antara sekretariat alat kelengkapan dewan dengan bagian pemberitaan. Mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan wartawan terhadap informasi yang akan disampaikan

dibutuhkan wartawan koordinatiorat DPR dipenuhi, seperti fasilitas telepon, fasilitas saund di ruangan pers (pers room), juga membantu menghubungi nara sumber, yaitu anggota DPR, untuk menghadiri konferensi pers yang diprakasai wartawan koordinatriat DPR. Selain juga menyediakan ID Card, agar dapat dipisahkan antara wartawan tanpa surat kabar (bodrex) dengan wartawan yang tergabung dengan koordinator wartawan DPR.

Namun demikian memang di dalam memahami wartawan, khususnya terhadap kebutuhan informasi yang memenuhi nilai berita yang sangat diharapkan wartawan, belum dapat sepenuhnya dipenuhi. Mengenai hal tersebut diketahui dari wawancara dengan salah seorang wartawan media cetak, yaitu informan 3. dia mengatakan bahwa:

“Humas itu pada dasarnya hanya *guidance* saja di sini tidak mempunyai fungsi yang secara langsung gitu. Ya, tidak langsung berhubungan dengan wartawan, dalam arti semua urusan, tidak seperti di Departemen – Departemen. Karena di sini wartawan itu onnya hubungan langsung dengan sama sumber – sumber berita yang jumlahnya 550 itu. Mereka bisa berkomunikasi langsung tanpa melalui humas. Jadi humas di sini itu sebenarnya hanya lebih protokoler, sifatnya itu lebih administratif sebagai kelengkapan departemen atau lembaga. Berhubungan dengan wartawan... ya... tapi itu sifatnya hanya administratif. Misalnya kita ngurus ID Card sebagai persyaratan. Humas yang diartikan humas menjadi sumber berita itu hampir... bahkan hampir tidak.”

Menurut informan 4, bahwa belum adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, yaitu ketika ada kunjungan kerja ke daerah. Bagian pemberitaan memonopoli di dalam mengekspos berita tentang DPR. Sehingga wartawan koordinatiorat DPR merasa tidak adanya keadilan di dalam memperoleh berita selama kunjungan kerja ke daerah.

“Misalkan ada acara – acara kunker, banyak wartawan yang nggak diajak, iya kan? Kunker kebanyakan dari mereka – mereka aja tuh. Justru kan



yang memiliki humas, tapi ada juga yang namanya lain, tapi kegiatannya adalah kegiatan humas, yang membedakannya bahwa di kehumasan parlemen, di manapun dia, apakah di DPR maupun di DPRD, itu pasti memiliki keterkaitan dengan dewan maupun alat kelengkapan dewan. Karena sesungguhnya merekalah yang disebut sebagai komunikator kehumasannya. Sekretariat itu adalah komunikator kehumasan yang fungsinya adalah mewujudkan komunikasi komunikator politiknya.”

Berdasarkan uraian di atas menegaskan bahwa kebijakan kehumasan DPR memang sesuai dengan posisi dan karakter organisasinya. Karena sesungguhnya yang disebut sebagai komunikator kehumasan adalah anggota Dewan. Sedangkan, Sekretariat Jenderal DPR itu adalah Komunikator Kehumasan yang berfungsi untuk mewujudkan komunikasi komunikator politik anggota DPR. Sehingga kurang tepat membandingkan kehumasan DPR dengan kehumasan Departemen – Departemen.

Hasil penelitian pada bagian pemberitaan DPR menunjukkan bahwa bagian pemberitaan DPR telah melakukan kegiatan pengelolaan relasi dengan media massa dan wartawan. Walaupun masih terdapat kelemahan di dalam mendistribusikan informasi yang bernilai berita. Namun demikian kelemahan itu diimbangi dengan memfasilitasi wartawan koordinatiorat DPR dengan baik. Karena memang tugas – tugas bagian pemberitaan itu adalah tugas – tugas memfasilitasi wartawan koordinatiorat DPR di dalam meliput berita – berita di DPR.

## **2. Mengembangkan Strategi**

Menurut Yosai Iriantara (2005: 91),

strategi pada dasarnya merupakan kebijakan untuk rncapaj tujuan yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah taktik untuk pencapalan tujuan yang sudah ditetapkan. Ada pula Yang menyebut strategi sebagai rencana dan memberi Penjelasan atas metode yang dipakai untuk mencapai tujuan

Strategi kebijakan kehumasan DPR tersebut menjabarkan kebijakannya untuk lebih memasyarakatkan nama organisasi di dalam rangka membangun citra DPR sebagai organisasi yang kinerjanya lebih berkualitas. Strategi tersebut dikembangkan agar produk – produk, dalam hal ini produknya adalah Undang – Undang, mendapatkan kepercayaan publik, karena publik sudah mempercayai nama besar atau reputasi DPR sebagai lembaga yang merupakan kepanjangan tangan rakyat.

Strategi tersebut kemudian dikembangkan menjadi taktik yang melahirkan prinsip-prinsip kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Taktik tidak lain merupakan perincian cara untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Bila kita ingin perusahaan kita lebih menonjol ketimbang merk produk yang dihasilkan perusahaan maka taktik yang ditempuh akan berbeda dengan taktik yang dijabarkan dan kebijakan transparansi dan akuntabilitas. Pada intinya, taktik merupakan strategi yang dilaksanakan dalam tindakan (strategy in action).

Taktik-taktik yang dikembangkan dan strategi sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya meliputi:

1. Terus-menerus mengembangkan materi PR untuk media massa
2. Menggunakan berbagai media yang ada untuk menyampaikan pesan kepada publik
3. Membangun dan memelihara kontak dengan media massa
4. Memosisikan organisasi sebagai sumber informasi handal untuk media massa dalam bidang tertentu, misalnya untuk produk ramah-lingkungan.
5. Memosisikan pimpinan organisasi sebagai juru-bicara atau ketua dalam asosiasi profesi atau asosiasi perusahaan sejenis

perkembangan pembahasan atau pelaksanaan fungsi tugas dewan yang kurang diketahui publik dalam framing DPR. Jadi kalau selama ini kita tidak bisa kita kuasai itu melalui konferensi pers, kita blok. Jadi mau kita bisa kita tuangkan secara penuh, kita framing media itu melalui persepsi kita.”

Lebih lanjut Informan 1 mengatakan,

”Selain itu kita juga melakukan kerja sama dengan TVRI, dua minggu sekali, ini dalam Cafe Kata. Ini juga sosialisasi yang sama terhadap kegiatan dewan. Metro TV di Public Corner, dua minggu sekali, juga sudah kita secara terus – menerus melakukan kerangka sosialisasi... sekarang ini kita juga melakukan kerja sama dengan TV One dalam bentuk Tajuk Pariwara Parlemen setiap dua minggu sekali.”

Uraian tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR, melalui bagian pemberitaannya telah menerapkan taktik yang dikembangkan dan strategi sebuah organisasi. Taktik itu adalah menggunakan berbagai media yang ada untuk menyampaikan pesan kepada publik.

Sedangkan di dalam membangun dan memelihara kontak dengan media massa, salah satu taktik lain yang dikembangkan dan strategi sebuah organisasi, yaitu baru dengan TV Swara. Di mana TV Swara merupakan mitra TV Parlemen, yaitu stasiun TV yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal DPR. Oleh karena, TV Parlemen baru berusia dua tahun, maka diperlukan pelatihan. Karena biaya pelatihan itu tidak kecil, maka TV Parlemen melakukan kerja sama dengan TV Swara yang biaya pelatihannya masih terjangkau oleh anggaran yang dimiliki oleh Biro humas dan Pemberitaan.

Dengan demikian kerja sama dengan TV Swara, bukanlah hanya sekedar sebagai mitra bisnis, tetapi di sana dibangun dan dipelihara kontak dengan TV Swara. Karena kemitraan itu dibangun atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan.

Lebih lanjut Informan 2 menambahkan,

"Kalau "cincin" atau segala macam. Itu persoalannya pada Keanggotaan DPR juga lho. Kan, yang menentukan "cincin" itu kan, adalah BURT bukan di Sekjen. Sekjen hanya operasional. Sementara yang dibutuhkan wartawan adalah *decision maker*, yang mengambil keputusan itu siapa? Ya, anggota DPR itu juga. Sementara Sekjen hanya menjalankan apa yang menjadi keputusan politik. Jadi nggak ada kaitannya dengan birokrasi pemberitaan, kesekjenan. Mereka lebih pada fasilitator gitu aja, mediator."

Tetapi tidak demikian yang diinginkan oleh wartawan. Informan 3 sebagai wartawan yang sangat memerlukan informasi yang tidak dapat ia peroleh secara langsung. Sehubungan dengan hal itu, maka ia sangat mengharapkan bagian pemberitaan sebagai mitra dapat memberikan informasi yang ia butuhkan. Tetapi tidak, dan itu sangat disayangkan olehnya,

"Hubungan baik itu menurut saya, mestinya mereka saling mengisi. Misalnya kita butuh humas sebagai perwakilan lembaga yang mempunyai informasi, mereka memberikan informasi kepada kita. Kita ingin berhubungan dengan Sekjen pun kita jarang – jarang. Tanya ke humas, kan?... Saya nggak tahu humas di sini. Jangan – jangan malah nggak tahu... Kalau mereka menguasai saya yakin, artinya soal "cincin" misalnya orang humas menguasai sekali menjadi juru bicara, menerangkan ini lho soal "cincin" itu begini. Pasti suatu saat dia diposisikan oleh media maupun oleh lembaganya dalam posisi yang baik."

Peneliti Komunikasi Politik P3DI Setjen DPR RI menjelaskan tentang masalah ini,

"Motif komunikasi bagian Sekretariat adalah mewujudkan motif komunikasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi dewan. Artinya siapa sesungguhnya memiliki motif komunikasi itu, tentunya dewan; anggota

Tambahan kepala bagian pemberitaan DPR mengenai jadwal yang diwajibkan dan selalu dimonitor untuk di Update, disanggah oleh Informan 4, karena fakta yang dia temui kadang – kadang ada yang tidak update.

“Jadwal aja kan mungkin juga dari Komisi – Komisi., itu tergantung komitmen. Jadi kadang – kadang jadwal ada yang tidak up to date... untuk informalitas mungkin ya, kayak jadwal - jadwal mingguan.”

Sanggahan Informan 4 mengacu kepada kualitas Sumber Daya Manusia di bagian pemberitaan. Hal yang telah menjadi permasalahan – permasalahan yang terkait secara sistematis mengenai aparatur pemerintah. Ambar Teguh Sulistiyani (2004: 31) menyampaikan otokritik untuk system penataan aparatur birokrasi, dalam bukunya yang berjudul *Memahami good Governance: dalam Perspektif Sumber daya Manusia*, yang pada poin ketujuh, yang menjelaskan bahwa:

Peraturan disiplin pegawai tidak mampu mengikat secara tegas, karena unsure pimpinan sendiri seringkali melakukan pelanggaran disiplin, misalnya masuk kantor terlambat, sering meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan keluarga, seperti mobil dinas untuk pergi vakansi bersama keluarga, mengantar belanja dll, dengan kata lain tidak mampu memberikan suri tauladan kepada anak buahnya. Akibat yang muncul adalah peraturan akhirnya tidak memiliki wibawa sebagai alat penegakkan disiplin pegawai.

Penulis sengaja menghadirkan otokritik untuk system penataan aparatur birokrasi sebagai jawaban atas kualitas Sumber daya manusia. Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, memang sangat berkaitan antara kualitas Sumber daya manusia, terutama di sekretariat jenderal DPR, dengan perilaku pimpinannya. Bila pimpinan jujur, peka dengan masalah pegawai, rajin dalam bekerja, tegas dengan keputusan yang diambilnya dll. Sedikit banyak mempengaruhi pada kedisiplinan pegawai. Pegawai menjadi hormat, segan atau tidak berani untuk berlaku seenaknya dan tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan yang telah menjadi *description*-nya.

ekonomi, budaya, segala macam kan. Nah, ini yang seringkali nggak *match* dengan teman – teman yang mayoritas di *press room*. Tetapi nggak masalah, salah satu strateginya ketika pemberitaan mau menggelar isu diskusi tentang ekonomi misalkan, mereka mengirim undangan ke masing – masing redaksi untuk wartawan ekonomi yang lebih sesuai dengan isu yang dibahas untuk dikirim ke *press room*.”

Dari uraian tersebut di atas juga tegambar mengenai kegiatan bagian pemberitaan di dalam mengembangkan strategi, yaitu dengan mengadakan diskusi dengan wartawan koordinatior DPR di ruangan pers (*press room*). Langkah ini sudah sesuai dengan konsep mengembangkan strategi menurut Yosol Iriantara (2005), yaitu mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab (*rapport*) dengan media.

Lebih jauh, informan 2 mengharapkan kualitas Sumber daya manusia bagian pemberitaan yang akan lebih baik. Dengan demikian peran humas dan pemberitaan akan jauh lebih luas, tidak hanya sekedar *mensupport* hal – hal teknis, tetapi juga bisa *mensupport* informasi. Sehingga humas dan pemberitaan akan menjadi tempat bertanya wartawan yang membutuhkan informasi yang bernilai berita.

“Jadi kalau saya mau memberi saran. Itu artinya begini, bisa saja peran dari biro – biro yang harus menjalankan fungsi sebagai PR itu untuk lebih *mensupport* apa yang dibutuhkan wartawan. Support itu dalam arti luas. Itu bisa support informasi, support fasilitas yang lebih memadai ... itu juga menuntut adanya peningkatan kinerja karyawan biro humas dan pemberitaan. Mereka harus lebih tahu dari wartawan.”

Mengenai hal tersebut, Peneliti Komunikasi Politik P3DI Setjen DPR RI juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas Sumber daya manusia di bagian pemberitaan, bahwa Sumber daya manusia yang dimiliki bagian pemberitaan di dalam menyebarkan informasi, masih pada putaran informatif, tetapi belum pada tingkatan kedalaman (*in-depth*). Sedangkan media

Namun sayangnya hubungan itu hanya terbatas pada memfasilitasi dan tidak dalam bentuk pemenuhan kebutuhan wartawan terhadap informasi. Hal ini disebutkan juga oleh informan 1 di dalam uraian berikut di bawah ini,

“Kita sangat dekat, kita dengan wartawan itu sangat dekat sekali. Apalagi sekarang tiap minggu, hari Kamis itu yang makan siang bersama wartawan, kebetulan materinya DPR, yang jadi moderatornya teman – teman wartawan. Jadi kita dekat sekali dengan wartawan dan kebetulan kalau pemilihan pimpinan, kita fasilitasi semua. Dan seluruh kebutuhan mereka untuk menunjang karya jurnalistik, kita siapkan semua. Kayak komputer, di sana ada WIFI, ada internetnya, AC, sound systemnya, kita siapkan semua. Jadi kalau ada kendala – kendala atau masalah peralatan pendukung, mereka tidak segan – segan ngasih tahu kita, dan kita koordinasikan dengan unit terkait.”

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa informan 1, hanya dengan memberikan kemudahan fasilitas kepada wartawan Koordinatoriat DPR sudah memandangnya sebagai hubungan yang terbina dengan sangat baik. Sedangkan konten atau isi dari hubungan itu sendiri terabaikan. Seperti menyediakan kebutuhan wartawan terhadap informasi yang mempunyai nilai berita atau informasi yang memiliki kedalaman.

Informan 3 mengatakan bahwa hubungan wartawan Koordinatoriat DPR dengan media massa nggak ada kualitasnya, hanya kuantitasnya. Seperti mengadakan *press gathering* setiap tahun dua kali, menurut informan 3 tidak ada kualitasnya.

“Iya, baik – baik aja, tapi hanya baik sekedar *say hello* itu tadi, kontennya nggak ada. Kualitas nggak ada, hanya kuantitas. Kita tadi ada pertanyaan *press gathering*, jadi nggak ada kualitasnya, kuantitas aja. Bahwa kita ada *press gathering* setiap setahun dua kali, itu kan kuantitas bukan kualitas. “

instrumental dalam sebuah bentuk fungsi sosial, dalam organisasi – organisasi dan di masyarakat secara luas.

Menurut Littlejohn jaringan dapat dicirikan dengan tiga cara, yaitu lingkup, fungsi, dan struktur. Aspek jaringan yang pertama adalah Lingkup, mempelajari jaringan dari perspektif komunikasi individu, pasangan, kelompok, organisasi atau antarorganisasi. Individu berkomunikasi dengan individu lain dalam pasangan – pasangan, pasangan – pasangan berkumpul menjadi kelompok, dan kelompok – kelompok saling berkaitan satu sama lain dalam suatu jaringan keseluruhan.

Aspek jaringan yang kedua adalah fungsi komunikasi, termasuk produksi, inovasi, dan pemeliharaan. Komunikasi produksi berhubungan dengan arah, koordinasi, dan kontrol dari aktivitas – aktivitas tugas, termasuk apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya. Komunikasi inovasi, jalur melalui mana saran – saran dan pandangan – pandangan dikomunikasikan, memunculkan perubahan dan pemikiran – pemikiran baru di dalam sistem. Terakhir, komunikasi pemeliharaan mempertahankan nilai – nilai dan hubungan – hubungan yang diperlukan untuk tetap mempersatukan sistem tersebut.

Aspek jaringan yang ketiga adalah struktur, atau pola – pola atau keteraturan yang muncul dalam transmisi pesan. Di sini anda akan berminat pada siapa berbicara dengan siapa secara teratur, arus komunikasi melalui organisasi.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai strategi biro humas dan pemberitaan DPR, yang dijalankan oleh bagian pemberitaan, di dalam mengembangkan jaringan terhadap media massa dan wartawan koordinatioriat DPR, berikut penjelasan terhadap pernyataan dari informan - informan mengenai taktik yang dikembang dari strategi yang diterapkan bagian pemberitaan DPR.



informasi tentang peristiwa A. Pemberitaan tentunya juga mempunyai pandangan atau feeling yang sama dengan wartawan sehingga itu membuat bisa nyambung gitu lho. Bisa saling melengkapi. Wartawan bisa mengandalkan sumber - sumber informasi yang bisa dipercaya dari pemberitaan. Tapi persoalannya seringkali yang terjadi itu, wartawan itu mencari informasi sendiri - sendiri, tidak mengambil sumber informasi dari pemberitaan, karena faktor pertama itu tadi seringkali nggak ada linkings.”

Dari uraian tersebut di atas tergambar bahwa fungsi lingkup dan fungsi komunikasi produksi tidak berjalan baik. Sehingga merupakan gangguan di dalam membangun jaringan dengan media massa dan wartawan.

Selain itu dapat pula diperhatikan uraian informan 1 berikut ini, yang menggambarkan adanya keteraturan yang muncul dalam transmisi pesan. Karena faktor tidak merasa pantas untuk mengutarakan yang menurutnya bukan wilayahnya. Hal ini memperlihatkan peran fungsi komunikasi struktural yang besar di lingkungan sekretariat jenderal DPR.

Itu yang akan kita garap. Karena sangat sulit untuk... kalau kita mengetahui secara politik, kalau toh kita mengetahui secara substansi. Tapi secara politik apakah punya kewenangan? Kabag pemberitaan menyampaikan.. misalnya masalah RUU susduk misalnya, teman - teman itu kan yang pendukungnya staf ahli itu kan, yang substansi kan teman-teman dari kita sendiri. Tapi apakah mereka boleh atau secara politik punya kewenangan. Teman - teman itu kan lebih tau daripada...tapi apa mereka boleh atau secara politik punya kewenangan? Teman - teman RUU susduk itu kan teman - teman itu mereka lebih tau... boro - boro kita bicara komisi, pak Agung sendiri pernah diprotes gara-gara menyampaikan sesuatu yang sebetulnya menurut saya sah - sah saja, mereka sudah dikasih di tatib pasal 26 sebagai speaker. Itu kan diperotes apalagi kabag humas, otoritasnya darimana nggak ada sama sekali.

Namun tidak demikian dalam pandangan informan 3, yang menginginkan humas dan pemberitaan DPR mengganggu aspek jaringan yang berciri struktur. Yaitu dengan melangkah keluar dari tugas kehumasan yang hanya memfasilitasi,

Bako Humas yang diselenggarakan tiap – tiap instansi. Seperti yang disampaikan oleh informan 5, sebagai berikut;

bahwa bagian pemberitaan juga rutin mengikuti acara Bako Humas yang diselenggarakan tiap – tiap instansi untuk dapat menimba ipengalaman dari hasil diskusi saat acara berlangsung.

Dari beberapa uraian pernyataan tersebut di atas, maka memunculkan perubahan dan pemikiran – pemikiran baru di dalam sistem, yaitu sebagaimana disampaikan oleh informan 2 di bawah ini

Seperti yang saya bilang, pertama kali, tugas mereka adalah tugas memfasilitasi. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan fasilitasi, bahwa disitu ada upaya untuk peningkatan *media gathering*, *media release*, *media conference*. Itu adalah kebijakan dalam rangka memfasilitasi. Tapi pada tataran motif komunikasi, yang diwujudkan oleh sekretariat adalah motif komunikasi, jadi, pelaksanaan tugas dan fungsi dewan. Motif komunikasi bagian sekretariat adalah mewujudkan motif komunikasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi dewan. Artinya siapa sesungguhnya memiliki motif komunikasi itu? Tentunya dewan, anggota maupun alat kelengkapan pada khususnya.

Dari uraian yang disampaikan oleh informan 2 tergambar bahwa fungsi komunikasi inovatif sedang terjadi di dalam tubuh biro humas dan pemberitaan. Di mana mereka akan melaksanakan motif komunikasi sekretariat, yaitu mewujudkan motif komunikasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi dewan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara media massa dan wartawan koordinatiorat DPR dengan Biro humas dan pemberitaan DPR, yang mana menjalin hubungan dengan media massa dan wartawan koordinatiorat DPR merupakan tanggung jawab bagian pemberitaan, dalam bentuk relasi tugas kurang baik, tetapi dalam relasi pribadi baik. Dalam bentuk relasi tugas kurang begitu baik, karena biro humas dan pemberitaan, dalam hal ini bagian

## 1. Kendala yang dihadapi

Dalam membina hubungan dengan media massa dan wartawan yang tergabung dalam koordinatoriat wartawan DPR (media relations), bagian pemberitaan DPR juga menghadapi persoalan atau permasalahan, karena selain keduanya memiliki visi dan misi yang berbeda, juga karena kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh bagian pemberitaan adalah kebijakan – kebijakan memfasilitasi sebagai sarana untuk mewujudkan motif komunikasi yang dimiliki dewan, maka membuat persoalan – persoalan baru untuk wartawan yang tidak mengerti kondisi yang dihadapi bagian pemberitaan DPR. Selain itu kendala yang dihadapi bagian pemberitaan DPR juga tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi.

## 2. Hambatan pelaksanaannya

Hambatan yang dapat dijumpai dalam pelaksanaan kebijakan memfasilitasi strategi *media relations*

- a. Kurangnya penguasaan pemahaman pengetahuan di bidang jurnalistik, yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi kegiatan *press release* yang dikeluarkan oleh bagian pemberitaan DPR.
- b. Banyaknya wartawan *Bodrex* di DPR, yang bisa menjadi hambatan di dalam membina hubungan dengan media massa dan wartawan yang tergabung dalam koordinatoriat wartawan DPR. Wartawan *Bodrex* di DPR bukan hanya wartawan tanpa surat kabar, tetapi juga wartawan dengan surat kabar. Definisi wartawan *Bodrex*, yang peneliti dapat dari kepala bagian pemberitaan DPR, adalah wartawan yang suka memeras anggota DPR maupun pejabat sekretariat jenderal DPR.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Diskusi

Dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Humas dan Pemberitaan berada di bawah kepemimpinan Deputy Bidang Persidangan dan Kerjasama antarparlemen. Kedudukannya berada di bawah Setjen dua level, sehingga memungkinkan pembatasan lingkup fungsi dan tugas-tugas Humas DPR RI, khususnya sebatas tugas pokok Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR agar dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki DPR.

Dengan demikian kebijakan – kebijakan yang dihasilkan Biro Humas dan Pemberitaan adalah kebijakan fasilitasi. Semua upaya yang dilakukan oleh Biro humas dan pemberitaan, seperti pers release, pers gathering, dan konferensi pers adalah tidak lain kebijakan dalam rangka memfasilitasi. Sedangkan menurut H.Frazier Moore, Ph.d. (2004: 6), humas bermakna fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.

Sementara itu, karakteristik lembaga DPR sebagai lembaga politik yang di dalamnya terdiri fraksi – fraksi sebagai pengelompokkan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Konsekuensinya, kebijakan komunikasi yang dapat digunakan sebagai fondasi bagi upaya membangun citra

Strategi *media relations* yang menjadi kebijakan bagian pemberitaan, tetap merupakan strategi media relations di dalam rangka memfasilitasi dewan. Namun demikian tetap penting di dalam membentuk pencitraan DPR yang lebih baik. Karena yang dimaksud dengan strategi merupakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah taktik untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. (Yosal Iriantara, 2005: 91)

## B. Kesimpulan

Permasalahan pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana hubungan media massa dan wartawan koordinatior DPR dengan DPR RI. Yang kemudian dibatasi pada bagaimana bagian pemberitaan DPR mengelola relasi, bagaimana bagian pemberitaan DPR mengembangkan strategi, dan bagaimana bagian pemberitaan DPR mengembangkan jaringan.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagian pemberitaan DPR mengimplikasikan strategi *media relations* di DPR RI.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, secara konsep, yang dikemukakan dalam bab II, pengertian – pengertian, definisi – definisi maupun pendapat – pendapat para ahli mengenai humas, kegiatannya, ataupun publik yang menjadi sasarannya, seperti media massa.

Dari hasil penelitian yang diperoleh antara lain:

1. Humas DPR RI, secara *State of Being* (Kelembagaan) dilakukan oleh Biro Humas dan Pemberitaan. Sedangkan *communication method* dilakukan oleh Bagian Pemberitaan. Tugas Pokok dan Fungsinya di kesekretariatan adalah membina hubungan dengan

kerjasama dengan beberapa media elektronik nasional, seperti TVRI, Metro TV, TV One, dan RRI PRO 3 FM.

- c. Peran bagian pemberitaan DPR di dalam memfasilitasi pengembangan jaringan, dapat dilihat dengan mengikuti secara rutin acara Bako Humas yang diselenggarakan tiap – tiap Instansi.
4. Kegiatan bagian pemberitaan DPR yang berkaitan dengan kegiatan memfasilitasi media massa dan wartawan yang tergabung dalam koordinatariat wartawan DPR, yaitu berupa:
  - a. *Press Release*
  - b. Konferensi pers
  - c. *Press gathering*
  - d. *Media access*

## B. Rekomendasi

### 1. Akademis

Hasil penelitian mengenai hubungan media dengan DPR dengan fokus kajian strategi media relations yang meliputi mengelola relasi, mengembangkan strategi, mengembangkan jaringan ini memperlihatkan gambaran realitas tentang tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Biro Humas dan Hukum di dalam merencanakan dan menjalankan strategi *media relations* masih ditemukan kelemahan dalam memfasilitasi media massa dengan informasi yang bernilai berita. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai hubungan media dengan DPR dengan fokus kajian strategi *media relations* yang jauh lebih dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro, dan Bambang Q-Anees. 2007. *Filasat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ardianto, Elvinaro, dan Lukiati Komala Erdinaya. 2007. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bell, Quentin. 1991. *The PR Business*. London: Kogan Page Limited.
- Bivins, Thomas H. 2005. *Public Relations Writing: The Essentials Of Style And Format*. N. Y. : Mcgraw-Hill/Irwin.
- Black, Sam, dan Melvin L. Sharpe. 1988. *Ilmu Hubungan Masyarakat Praktis*. Jakarta: Intermedia.
- Bland, Michael, Alison Theaker, David Wragg. 2004. *Hubungan Media Yang Efektif*. Jakarta: Erlangga.
- Bowman, Pat, and Nigel Ellis. 1982. *Manual of Public Relations*. London: Heineman.
- Cutlip, Scott M., and Allen H. Center. 1985. *Effective Public Relations*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Daft, Richard L. 2007. *Understanding The Theory And Design Of Organizations*. Natorp Boulevard Mason: Thomas South-Western.
- De Janasz, Suzanne C., Karen O. Dowd, And Beth Z. Schneider. 2006. *Interpersonal Skills In Organizations*. N. Y. : Mcgraw-Hill/Irwin.
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Goldhaber, Gerald M.1990. *Organizational Communication*. Dubuque: Wm.C. Brown.
- Gozali, Dodi M. 2005. *Communication Measurement: Konsep dan Aplikasi Pengukuran Kinerja Public Relations*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Hasan, Erlena. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Sendjaja, Sasa Djuarsa, Dkk. 2005. Materi Pokok Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Universitas Terbuka. -

Shoemaker, Pamela J., And Stephen D. Reese. 1996. Mediating The Message: Theories Of Influences On Mass Media Content. N. Y.: Longman.

Siagian, Sondang. 1986. Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi. Jakarta: Gunung Agung.

Smith, Ronald D. 2002. Strategic Planning For Public Relations. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Stokes, Jane. 2003. Media and Cultural Studies: how to do. London: SAGE.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gava Media.

Sutarno NS. , 2006. Cermin & citra diri. Jakarta : Jala Permata.

Wardhani, Diah. 2008. Media Relations: Sarana Membangun Reputasi Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wilcox, Dennis L., And Glenn T. Cameron. 2006. Public Relations: Strategies And Tactics. Boston: Pearson.

#### Jurnal/Artikel/Referensi

Baso, Moerad. 2003. Pembinaan SDM berbasis kompetensi: suatu pendekatan strategik dalam upaya peningkatan kualitas SDM dalam konteks globalisasi dan otonomi daerah. Manajemen Usahawan Indonesia, XXXII 02 (Februari): 35-4.

Firnas, M. Adian, Nazimin Saily, dan Sudarini. 2007. Persepsi Dan Partisipasi Politik Dalam Pemilu 2004, Survey Terhadap Mahasiswa IISIP Jakarta. Yayasan Kampus Tercinta, 04(Januari): 51-64.

Sutoyo, Agus. 2003. Reposisi peran humas dan dinamika pengembangan perpustakaan. Warta jujur & mandiri 8 Januari, 25-28.



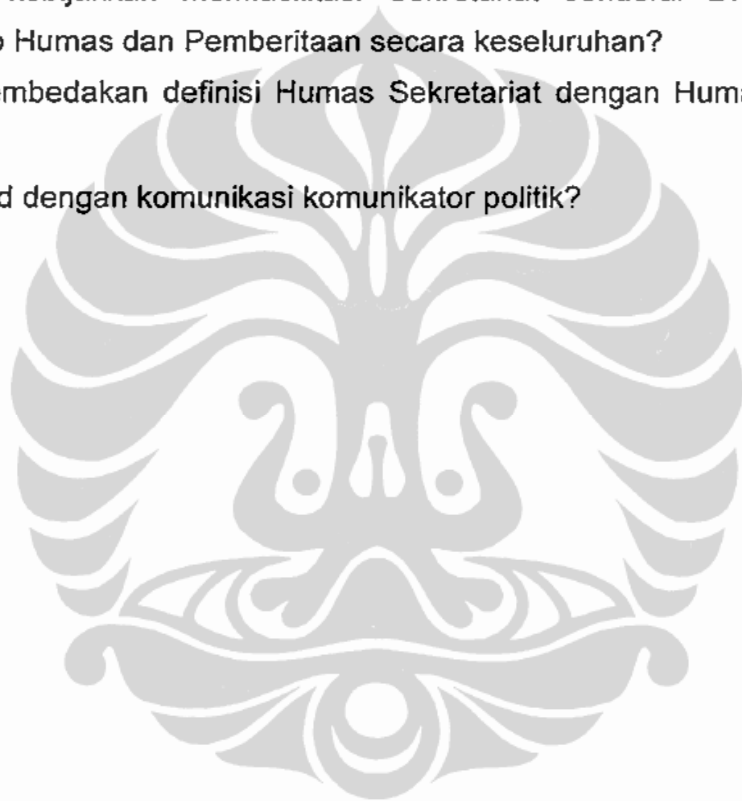
## Lampiran 1

### Pedoman Wawancara

Nara Sumber: Drs. Ahmad Budiman, MPd.

Peneliti Komunikasi Politik P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI

1. Menurut saudara, bagaimana dengan kedudukan Biro Humas dan Pemberitaan yang jauh secara birokrasi dengan Sekretaris Jenderal DPR?
2. Bagaimana dampak kebijakan memfasilitasi Sekretariat Jenderal DPR terhadap kegiatan Biro Humas dan Pemberitaan secara keseluruhan?
3. Apakah ada yang membedakan definisi Humas Sekretariat dengan Humas Departemen?
4. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi komunikator politik?



adalah bisa dengan memberikan kesempatan luas untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber informasi yang memang memiliki ketepatan untuk melakukan ini semua. Misalkan, kalau kegiatan itu berlangsung di Komisi I, maka unsur Komisi I lah yang seharusnya menyampaikan. Jadi itu juga sekaligus meningkatkan kredibilitas komunikator politik yang menyampaikannya, kemudian menyampaikan informasi ke secara benar dan positif itu bisa dilakukan. Walaupun dilakukan oleh orang sekretariat, itu bisa dilakukan. Sekretariat Komisi I maupun sekretariat jenderal pada khususnya. Tapi informasi yang disampaikan itu adalah lebih tepat, lebih benar dan positif, itu dilakukan anggota Komisi yang bersangkutan.

Tanya : Jadi bukan oleh orang humas atau pemberitaan itu?

Jawab : Iya. Fasilitas untuk ke situ bisa saja dilaksanakan. Artinya begini, kalau dari tataran teknis, misalnya begini, bisa saja bagian pemberitaan itu memfasilitasinya dengan cara membuat release atas keseluruhan kegiatan tersebut, lalu release itu disampaikan kepada anggota yang hendak menyampaikan. Dia membacanya, apabila sudah dinyatakan ini sebagai suatu informasi yang sudah benar dan positif, sesuai dengan kenyataannya. Nah, maka dialah sesungguhnya yang bisa menyampaikannya. Artinya anggota Komisi I itulah sesungguhnya yang bisa menyampaikannya. Tentunya nanti oleh wartawan akan dilakukan pendalaman-pendalaman. Pendalaman-pendalaman itu kan yang lebih menguasai adalah anggota yang bersangkutan. Itulah makanya hasil akhir bahwa pendalaman-pendalaman itu perlu disampaikan yang memang sumber informasi yang kredibel. Jadi hubungan Interpedensi di DPR memiliki kekhasan karena motif komunikasi yang

pemerintahan, lembaga pemerintah maupun di lembaga swasta itu beda

Tanya : Itu seperti menunjukkan konsep sekretariat. Nah, itu konsepnya apa ya Mas, beda-beda. Jadi konsep sekretariat itu apa? Konsep departemen itu apa? Sehingga humasnya bisa berbeda-beda.

Jawab : Ya. Sebetulnya dalam posisinya, sebagai apa karena metode communication ataupun seperti itu. Itu sama. Pasti di departemen ada juga yang memiliki humas, tapi ada juga yang namanya lain, tapi kegiatannya adalah kegiatan humas. Yang membedakannya bahwa di kehumasan parlemen, di manapun dia, apakah di DPR maupun di DPRD, itu pasti memiliki keterkaitan dengan dewan maupun alat kelengkapan dewan. Karena sesungguhnya merekalah yang disebut sebagai komunikator kehumasannya. Sekretariat itu adalah komunikator kehumasan, yang fungsinya adalah mewujudkan komunikasi komunikator politiknya.

Tanya : Komunikasi komunikator politik?

Jawab : Iya, Komunikasi Komunikator politiknya siapa? Dewan, alat kelengkapan dewan. Humas adalah komunikator kehumasan, tugasnya adalah mewujudkan tadi. Jadi kegiatan-kegiatan memfasilitasi tadi, yang dilakukan melalui komunikasi satu arah maupun dua arah adalah bagian dari upaya mewujudkan komunikasi komunikator politik. Artinya apa? Bahwa ada hal-hal yang memang menjadi keinginan dari komunikator politik untuk disampaikan, disebarluaskan kepada... apa ad kebijakan-kebijakan yang dimiliki komunikator politik untuk

Jawab : Kita kebijakan untuk mewujudkan itu saja.

---

Jawab : Jadi perbedaan SDM yang ada di pemerintahan itu, perlu disikapi dengan cara, secara periodik itu terus meningkatkan kemampuan. Intinya adalah bagaimana mengemas dalam satu informasi berbagai perbedaan yang ada di dewan. Menunjukkan informasi yang benar dan positif. Yang ada sekarang memang SDM di kita telah melakukan upaya untuk menyebarluaskan informasi, masih pada putaran informatif. Jadi inilah yang menjadi perbedaan dengan keinginan yang dirasakan oleh media terhadap informasi tersebut. Bahwa media ingin kedalaman atau in-depth dari suatu informasi, tentang kenapa sih kebijakan ini? Tentang kenapa sih fraksi ini mempunyai pandangan ini? Tentang keterbukaan informasinya, transparansi itu kan yang diinginkan oleh media. Jadi masing-masing media mempunyai kebijakan atau framing dari media. Ini yang tidak atau belum tercermin pada berita-berita yang kita siapkan selama ini. Jadi berita-berita yang kita hasilkan ini baru pada tataran gradasinya informatif. Jadi, maka terkesan yang disampaikan adalah yang baik-baik. Dan tidak menyampaikan tentang proses yang sesungguhnya atau perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan ini memang terkait dengan kualitas. Tentang boleh, tidaknya kita menyampaikan? Itu boleh.

Tanya : boleh?

Jawab : itu boleh kita menyampaikan, selama memang itu positif. Karena tugas kita itu adalah tadi mewujudkan motif komunikasi

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Nara Sumber: Kepala Bagian Pemberitaan DPR RI

1. Seperti apakah kebijakan Strategi Media Relations di DPR?
2. Menurut Bapak, apakah Biro Humas dan Pemberitaan dapat menjadi Juru Bicara Sekretariat?
3. Bagaimanakah kedudukan Biro Humas dan Pemberitaan di struktur Sekretariat Jenderal?
4. Apakah bisa disetarakan kedudukannya dengan Sekretaris Jenderal DPR?
5. Bagaimana strategi Bagian Pemberitaan di dalam meningkatkan SDM?
6. Apakah media online yang dimiliki DPR selalu Up to Date beritanya?
7. Bagaimana hubungan DPR dengan Media Massa?
8. Apa pandangan Bapak mengenai istilah bad news is a good news di kalangan wartawan?
9. Bagaimanakah perlakuan DPR terhadap media yang beragam?
10. Bagaimana dengan hubungan pribadi antara bagian pemberitaan dengan wartawan?
11. Apa yang dimaksud dengan wartawan bodrex?
12. Bagaimana jika orang nomor satu Dewan atau Sekretariat Jenderal DPR tidak dekat dengan media?
13. Apakah mungkin Biro Humas dan Pemberitaan tugasnya tidak hanya memfasilitasi saja?

kita. Selain itu kita juga melakukan kerjasama dengan TVRI, dua minggu sekali, ini dalam *café kata*. Ini juga sosialisasi. Yang sama terhadap kegiatan dewan. Metro TV di *public corner* dua minggu sekali juga sudah kita secara terus-menerus melakukan kerangka sosialisasi. Kita juga mempunyai TV parlemen. Jadi untuk diketahui TV parlemen sekarang ini baru berumur dua tahun. Satu hal yang masih dalam proses karena memang benar-benar dari nol. Namun sekarang kita sudah bisa membuat program di *internal broadcast system*. Jadi kayak model LCD kita yang di jaringan itu sudah kita isi dari jam 10 sampai dengan 3 sore. Ini kita lakukan melalui siaran-siaran langsung baik yang berada di komisi-komisi, pansus, maupun paripurnanya kita liput secara langsung dan kita siarkan. Harapan kita bahwa masyarakat yang berada di gedung DPR khususnya pers bisa meliput atau mengetahui hal-hal yang terjadi dpr melalui TV parlemen. Jadi sekarang Alhamdulillah teman-teman wartawan tidak terlalu berduyunduyun ke komisi atau pansus yang ramai, namun bisa menikmati, bisa monitor mengikuti persidangan melalui TV parlemen yang kita siapkan melalui LCD. Selain itu juga TV parlemen melakukan kerjasama dengan TV swara dalam rangka penyebaran ke masyarakat luas. Kenapa dengan TV swara? Karena ini semua dalam proses pelatihan juga bagi TV parlemen sendiri, yang kedua, keterbatasan anggaran juga. Karena kita sangat sulit, media-media elektronik, TV itu bisa mengikuti persidangan secara tuntas, jadi kita kan nggak mungkin melalui TV - TV yang lain mengikuti persidangan, kadang-kadang sampai 10 jam itu, harus berapa milyar yang harus kita keluarkan. Namun dengan TV swara masih bisa kita jangkau. Sekarang ini kita juga melakukan kerjasama dengan TV one dalam bentuk tajuk pariwisata parlemen setiap dua minggu sekali. Hari senin besok kita produksi, nanti bisa dilihat. Kita produksi dengan TV parlemen, terus kita persiapkan dengan TV one.

Tanya : Bagaimana dengan kinerja humas yang diharapkan dapat menjadi corong sekretariat?

Jawab : Humas di lembaga legislatif, lembaga politik itu kan sangat berbeda dengan di departemen yang mereka pimpinannya satu. Kita yang di lembaga politik, yang namanya *parte* itu kan, bicara. Semua anggota dewan dipilih oleh rakyat untuk bicara. Secara fungsi musti bisa melaksanakan sebagai jurubicara. Pertama, cakupan luasnya alat kelengkapan badan. Ada 16 alat kelengkapan badan, nggak mungkin kita bisa mengetahui perkembangan substansi yang berada di alat.. saya kira yang

Tanya : mengenai web dpr, tiap kali up date?

Jawab : up date terus. Misalnya untuk hari ini, itu harus masuk.

Tanya : itu tiap seminggu sekali atau?

Jawab : setia hari jadwal kegiatan. tinggal kegiatan DPE ada berapa? Kebetulan teman-teman saya tugaskan meliput di komisi-komisi. Saya wajibkan untuk mengupdate. Jadi saya *monitor* terus.

Tanya : lalu pak, menurut bapak bagaimana hubungan bagian pemberitaan dengan media?

Jawab : sekarang Alhamdulillah sangat, kita saling memahami tentang tugas dan fungsi kita masing-masing. Mereka menghormati kita dan kita menghormati dia dalam tugas fungsinya masing-masing. Tapi memang kami selalu berharap kepada wartawan untuk melakukan pemberitaan itu yang berimbang. Dan harapan kedua, bagaimana kelembagaan DPR itu tetap terjaga kehormatannya.. kami juga mempersilahkan kepada teman-teman wartawan untuk melakukan kontrol pada dewan, kalau itu memang kesalahan-kesalahan pribadi, monggo silahkan tapi tolong nama lembaga ini dijaga kehormatannya, jangan sampai rakyat tidak percaya kepada DPR. Karena bagaimana pun bahwa DPR ini adalah lembaga pengejawantahan rakyat dan lembaga pengembangan demokrasi. Kalau rakyat tidak percaya pada DPR, saya kira perjalanan demokrasi kita juga akan terhambat. Memang kalau ada anggota secara personal/pribadi melakukan kesalahan, monggo didukung secara... melalui media yang setimpal dengan perbuatannya.

Tanya : Di wartawan ada istilah *bad news is a good news*, menurut bapak?

Jawab : Ya. Memang kita tahu bahwa media itu lembaga bisnis, saya kira sah-sah saja kalau mereka melakukan itu. Tapi memang saya tetap berharap idealisme pers sebagai fungsi pendidikan politik, dia juga membangun pendidikan dengan pemahaman bagaimana rakyat itu tentang hak dan kewajiban politiknya. Jadi saya kira *bad news is a good news* harus diletakkan pada perspektif yang betul. Jangan hanya karena didorong oleh kepentingan bisnis, kepentingan idealisme dalam rangka ikut membangun bangsa melalui fungsi kontrolnya.. itu menjadi terhambat gitu.

Jawab : Sebetulnya kita kan saling melayani. Sekarang dari sisi kesejahteraan tema-teman wartawan itu kita perhatikan. Karena mereka juga kerja di sini, sudah membantu Negara dalam hal ini DPR, sekarang setiap bulan *snack* itu kita kirim ke wartawan. Jadi kita biayai untuk dialektika-dialektika, hari kamis kita siapkan makan siang, kita ada namanya makan siang bersama dengan wartawan. Sekaligus di sana kita sosialisasikan terhadap hasil-hasil perkembangan pembahasan tentang pelaksanaan fungsi dewan. Kalau kemarin RUU pelayanan publik gitu. Misalkan hari selasa besok disahkan kan kita bawa ke makan siang bersama wartawan. Sampai seberapa jauh pembahasan RUU pelayanan publik. Kira-kira kendala apa. Terus banyak hal kemarin juga kita melakukan kegiatan *pers gathering* di lembang. Kita *outbound*, kita ketemu teman-teman wartawan, kita ketemu pak Agung. Penting peningkatan kinerja, bu sekjen juga datang ke sana. Ini pendekatan-pendekatan informal kita, supaya kita menghormati.

Tanya : Bagaimana apresiasi terhadap wartawan terpaksa harus dilakukan?

Jawab : Kalau masalah teguran-teguran selama ini belum ada khususnya terhadap wartawan tiga bulanan, tahunan ini belum ada. Yang ada itu wartawan harian, kemarin beberapa kali karena mereka melakukan pemerasan. Dan diketahui sama pamdal kita bawa ke sini. Kita kasih tau ke redaksi untuk diganti. Kalau nggak kita coret. Pokoknya nggak kita kasih lagi ID.

Tanya : *Wartawan bodrex* yang dimaksud itu sebenarnya seperti apa?

Jawab : *Wartawan bodrex* ini adalah wartawan yang tidak melaksanakan tugas fungsinya, masalah jurnalistik. Jadi mereka itu ke sini hanya mencari duit melalui pers.

Tanya : Walaupun mereka punya penerbitan?

Jawab : Walaupun mereka punya penerbitan. Kadang-kadang kita sangat prihatin, karena terlalu mudahnya eforia kebebasan pers, terlalu mudahnya mendirikan pers, sehingga kadang-kadang wartawan ada yang rakus. Kemarin ada minta ke bu sekjen, lalu katanya kenapa melakukan itu. Saya hanya dikasih 300 kalau saya nggak minta ke sini bagaimana saya bisa hidup. Jadi menurut saya memang, *wartawan bodrex* adalah



Jawab : Sebetulnya kita di lembaga politik ini sangat sulit. Kemarin kita ketemu dengan staf kongres Amerika. Staf kongres itu, yang namanya humas sekretariat jenderal, itu hanya bertanggung jawab terhadap sekretariat, sementara kegiatan, isu yang ada di komisi - komisi, alat kelengkapan kongres itu. Alat kelengkapan itu sendiri yang jadi humasnya. Jadi setiap komisi, yang dijelaskan, ada 9 anggota, mereka didukung oleh 45 staf.

Tanya : Mungkin arah kita mau ke sana barangkali ya?

Jawab : Itu yang akan kita garap. Karena sangat sulit untuk... kalau kita mengetahui secara politik, kalau toh kita mengetahui secara substansi. Tapi secara politik apakah punya kewenangan? Kabag pemberitaan menyampaikan.. misalnya masalah RUU susduk misalnya, teman - teman itu kan yang pendukungnya staf ahli itu kan, yang substansi kan teman-teman dari kita sendiri. Tapi apakah mereka boleh atau secara politik punya kewenangan. Teman - teman itu kan lebih tau daripada...tapi apa mereka boleh atau secara politik punya kewenangan? Teman - teman RUU susduk itu kan teman - teman itu mereka lebih tau... boro - boro kita bicara komisi, pak Agung sendiri pernah diprotes gara-gara menyampaikan sesuatu yang sebetulnya menurut saya sah - sah saja, mereka sudah dikasih di tatib pasal 26 sebagai speaker. Itu kan diprotes apalagi kabag humas, otoritasnya darimana nggak ada sama sekali.

Tanya : Tapi sebagai jurubicara sekretariat bagaimana?

Jawab : Kita jujur saja, kalau dari sisi keanggotaan memang ini akan kita dorong terus, jadi kita bikin pedoman kehumasan. Masih kita yang aktif, kalau di kongres Amerika itu kan alat kelengkapan badan yang menyebarkan berita atau isu ke media. Sementara yang untuk sekretariat jenderal, kita selalu kerja sama dengan teman - teman unit - unit lain kalau itu membutuhkan klarifikasi atau pun sanggahan - sanggahan. Misalnya ada rapat internal pimpinan rapim, saya ingin jadi jurubicara,. Rapat bamus misalnya, kita bisa konferensi pers. Saya pernah ditantang pak Tosari, tapi secara struktural kita takut - takut gitu, nanti disalahkan lagi. Tapi kata pak Tosari nggak apa - apa disalahkan. Yang terjadi di DPR. Pencitraan dipengaruhi etika dan komitmen, sudah banyak yang kita lakukan dan media pun sudah banyak melakukan pemberitaan tentang kegiatan dewan. Tapi manakala ada masalah - masalah korupsi,

## Lampiran 5

### Pedoman Wawancara

Nara Sumber: Sekjen Koordinatoriat Wartawan DPR RI

1. Apa yang anda ketahui mengenai Media Relations DPR?
2. Narasumber yang bagaimanakah yang dibutuhkan media massa?
3. Bagaimana fasilitas yang disediakan DPR terhadap wartawan?
4. Menurut anda, bagaimana respon Biro Humas dan Pemberitaan bila diminta informasi?
5. Menurut anda, apakah Biro Humas dan Pemberitaan cepat dan tanggap atas permintaan informasi?
6. Apakah *press release* yang didistribusikan ke wartawan sudah *ready to print*?
7. Pernahkah saudara mendapat tanggapan dari Biro Humas dan Pemberitaan mengenai berita-berita yang negatif?
8. Bagaimana dengan pengorganisasian konferensi pers yang dilaksanakan bagian pemberitaan?
9. Bagaimana dengan kredibilitas narasumber yang disediakan DPR?
10. Bagaimana, menurut anda, kemampuan bagian pemberitaan di dalam memilah narasumber?
11. Apakah anda mengalami kesulitan di dalam menghubungi pejabat terkait yang berada dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR ataupun di Dewan untuk informasi tambahan?
12. Bagaimana dengan strategi media relations di DPR, apakah sudah diterapkan dengan baik oleh bagian pemberitaan?
13. Menurut anda apakah Biro Humas dan Pemberitaan DPR sudah benar – benar sebagai *public relations officer*?

lanjutan dari peristiwa itu. Itu kalau misalnya berita - berita yang online atau dot com jadi dia mengejar kecepatan. Ini polanya berbeda juga ketika wartawan majalah cetak atau koran. Karena yang dikejar wartawan cetak dan majalah ini yang kejar in-depth, dia lebih pada kedalaman informasi, karena dia punya deadline, sebelum dicetak itu informasi - informasi yang harus dilengkapi itu akan dicari oleh wartawan di lapangan terkait dengan sebuah isu, berita dan informasi. Jadi itu beda pola-polanya. Ini yang menyebabkan mengapa ketika muncul berita keesokan harinya dari peristiwa jumpa pers atau peristiwa yang ingin sampaikan nara sumber pada hari ini itu beragam sekali munculnya.

Pola-pola seperti ini kita itu harus paham. Sekarang begini antara pemberitaan dengan koordinat wartawan atau wartawannya atau masing - masing individu wartawan itu. Itu kan sifatnya kemitraan dan bagaimana pemberitaan itu mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh wartawan - wartawan ini. Misalnya wartawan, kita - kita ini yang setiap hari ngepos di DPR itu membutuhkan informasi tentang A misalkan. Informasi yang lebih lengkap informasi tentang peristiwa A. Pemberitaan tentunya juga mempunyai pandangan atau feeling yang sama dengan wartawan sehingga itu membuat bisa nyambung gitu lho. Bisa saling melengkapi. Wartawan bisa mengandalkan sumber - sumber informasi yang bisa dipercaya dari pemberitaan. Tapi persoalannya seringkali yang terjadi itu, wartawan itu mencari informasi sendiri - sendiri, tidak mengambil sumber informasi dari pemberitaan, karena faktor pertama itu tadi seringkali nggak ada linkings. Saya kira itu mempengaruhi layanan pemberitaan terhadap wartawan. Sebenarnya kita menghendaki adanya sinergi, sinergi positif berharap kita sebagai mitra kerja pemberitaan atau DPR sebagai institusi. Itu kan bisa saling melengkapi kebutuhan. Institusi DPR pastikan membutuhkan publikasi kan? Jadi apa pun yang terjadi apakah itu positif atau negatif membutuhkan media untuk mempublikasi berbagai kegiatan atau informasi ada yang di DPR dan sampai ke publik. Institusi spr itu sendiri kan nggak mempunyai akses langsung ke publik, yang mempunyai akses ke publik itu kan media. Jadi begini, media membutuhkan informasi, DPR atau pemberitaan sebagai fasilitator dari institusi DPR secara keseluruhan membutuhkan media untuk publikasi.

Tanya : Narasumber yang bagaimana yang dibutuhkan media?

Jawab : Nara sumber itu kan wartawan melihat, pertama, dari kompetensinya. Kompetensi itu kemampuan dia kan. Kalau seseorang mempunyai kompetensi yang tinggi, misalkan dia mempunyai gelar akademik yang tinggi, terus kemudian mempunyai keahlian tertentu dibidangnya. Itu bisa kita jadikan nara sumber. Terus kalau pun nara sumber itu tidak mempunyai kompetensi, dia nggak punya keahlian dibidangnya, tapi karena posisi dia, kapasitas dia sebagai pejabat publik, itu juga bisa dijadikan nara sumber. Jadi nara sumber itu tergantung, di *pertama*, faktor kompetensinya, yang *kedua* faktor kapasitas.

Tanya : Cuma kadang-kadang informasinya kurang ya?

memberikan informasi atau bahan berita untuk teman-teman. Apalagi kalau ada reses, nggak ada berita, sepi lagi nggak ada persidangan, kita bsgsimanapun mesti ada berita. Bagaimana caranya, sekarang akhirnya kita buat aja diskusi dengan menghadirkan sejumlah nara sumber. Nara sumbernya tentunya anggota dpr itu sendiri dan pengamat. Kita diskusi di situ, nah kita nggak harus ke mana-mana, yang penting kita dapat berita kan. Mengenai tema-temanya kita pilih untuk tema yang aktual pada saat itu

Tanya : mengenai program hubungan baik, Cuma prakarsa dari wartawan ya?

Jawab : saya pikir nggak juga, karena itu lebih pada pemenuhan kebutuhan kita sendiri. Kalau peran serta dari humas dpr itu kan, ya seperti itu tadi, mulai dijajaki atau diinisiatifkan baru belum lama ini, baru beberapa bulan. Tapi paling nggak itu sudah satu upaya untuk mendekatkan pemberitaan dengan pengurus koordinatioriat wartawan.

Tanya : bagaimana fasilitas yang disediakan bagian pemberitaan?

Jawab : jadi sampai saat ini memang pemberitaan itu berperan untuk mensupport kegiatan dari wartawan atau jurnalistik dari dpr. Baik itu prasarana, prasarana itu mencakup ruangan kan. Ruangan itu kan kepunyaan kelembagaan dpr kan, ruangan beserta seluruh fasilitasnya, seperti komputer, telepon terus kemudian sound sistem ketika kita ada acara-acara diskusi. Itu semua jadi lingkup pemberitaan. Ketika ada trouble, ada persoalan-persoalan teknis. Ya mereka yang menangani. Bagaimanapun kalau kita lihat posisi tau status kita, kita kan sekedar tamu kan? Jadi siapapun wartawan-wartawan yang meliput pemberitaan di situ, hanya singgah. Sehingga bekerja dengan fasilitas yang ada disediakan oleh dpr.

Tanya : terkait dengan permintaan informasi respon biro humas sendiri bagaimana?

Jawab : jadi memang di wartawan itu kan ada pengurus ya. Pengurus itu berperan sebagai mediator, fasilitator teman-teman wartawan yang tergabung dalam koordinatioriat itu. Wartawan yang tergabung di situ jumlahnya besar, mencapai seratusan sekian. Wartawan dari berbagai media: cetak, elektronik, terus nasional dan daerah. Karena sedemikian banyak itu kan nggak mungkin mereka itu nanti misalnya berkomunikasi dengan pemberitaan maupun... apa.. ini semuanya maka dibutuhkan kepengurusan. Untuk isu-isu memang seringkali kita berdiskusi dengan pemberitaan. Jadi kira-kira isu-isu apa yang menarik yang akan kita bahas. Tapi seringkali pula pemberitaan itu hanya menyodorkan isu kepada kita. Misalkan ini akan kita bahas, diskusi tentang ini, tentang ekonomi misalkan disodorkan itu sebagai sarana , terus teman-teman dalam posisi pasif. Hanya menerima, kalau dalam posisi seperti itu kan, seringkali nggak ada matchingnya antara pemberitaan dengan berita-berita yang diharapkan oleh wartawan-wartawan press room. Kalau kita lihat ke dalam lagi maka komposisi wartawan yang ada di press room ini kan, sebenarnya kan plotnya lebih ke politik. Masalah politik. Sementara isu-isu yang ada di dpr itu beragam, baik politik, kesra, hukum, ekonomi, dan segala

Jawab : struktur beritanya, struktur penulisan. Media itu kan punya pola. Pola berita kan ada, misalnya 5W+1H atau ada istilah pyramide terbalik. Struktur penulisan-penulisan seperti itu yang seringkali kurang difahami. Kita memahami karena mereka bukan wartawan kan? Mereka hanya nara sumber. Jadi mereka perannya nggak sampai sejauh penulis informasi seperti halnya menulis berita. Itu nggak salah. Tapi alangkah lebih baiknya ketika informasi yang ingin disampaikan itu juga sudah sesuai dengan struktur berita yang dibutuhkan wartawan. Dan jadi wartawan kan nggak usah mau lihat lebih jauh gitu lho. Jadi misalnya bila kita membaca informasi piramida terbalik itu informal, yang penting ada bagian atasnya. Jadi ketika kita mau baca dua, tiga paragraph di atas itu kita sudah tau maksud berita itu apa. Semakin nggak bawah semakin nggak penting. Informasikan begitu, berita kan begitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya pola-pola informasi yang disebarkan ke wartawan ya seperti itu. Jadi berlembar-lembar misalkan press release, informasi yang penting itu justru pada bagian tengah atau pada bagian bawah. Kan kita malah susah. Kalau misalnya dibagian awal-awal informasi yang penting yang disampaikan mereka itu apa, paragraph satu atau paragraph awal, yaitu akan memudahkan kita. Kita nggak usah buang-buang waktu sampai ke belakang.

Tanya : kalau sebaik itu press release yang dimaksud, apakah wartawan akan tetap mencari berita sendiri?

Jawab : cari berita sendiri harus dong. Kan informasi itu kan datangnya banyak sekali . informasi yang harus kita cari banyak sekali. Kita pilah-pilah, nggak semua berita yang disodorkan itu harus kita muat atau memnuhi kebutuhan kita untuk..

Tanya : ada koordinasi nggak dari pemberitaan?

Jawab : ya nggak lah. Jadi begini peran pemberitaan itu hanya fasilitator. Setiap wartawan itu sendiri mempunyai otonomi untuk mengolah berita yang dipublikasikan. Jadi ketika message di koran-koran itu munculnya hal-hal yang negatif. Ya sah-sah aja. Kan memang informasi itu yang mungkin dicari, digali, ditelusuri oleh umumnya media tersebut.

Tanya : pernah nggak ada tanggapan dari pemberitaan mengenai berita-berita yang negatif?

Jawab : ya pasti ada lah. Peran dari pemberitaan itu kan untuk menjaga citra kan. Misalnya ini ada berita miring, yang tendensius, yang segala macam gitu kan. Pemberitaan bisa aja mengkomplain. Saya anjurkan seperti itu, ini beritanya bner nggaknih,. Ini dasar fakta atau nggak

Tanya : o bukan mereka minta balncing news?

Jawab : o nggak, nggak..

Tanya : itu memang sudah menjadi tugasnya wartawan ya?

- Tanya : Pengorganisasian konferensi pers itu jadi ke pengurus wartawan di press room dan bukannya biro humas?
- Jawab : nggak kadang kala juga meminta secara intitusional ke bagian pemberitaan. Pemberitaan juga akan mengkomunikasikan dengan kita.
- Tanya : Jadi ini mempunyai otonomi sendiri?
- Jawab : ya ada kewenangan, mengatur.
- Tanya : Pemberitaan hanya sebagai fasilitator?
- Jawab : betul.
- Tanya : kredibilitas nara sumber yang disediakan bagaimana?
- Jawab : jadi kita itu kan menyampaikan informasi kepada publik nggak sembarangan ya. Nanti pembaca akan melihat siapa nara sumbernya.
- Tanya : Jadi kemampuan pemberitaan untuk memilah nara sumber?
- Jawab : sejauh ini sudah cukup memadai. Misalkan dia untuk isu-isu tertentu dihadirkan memang orang-orang yang punya posisi atau bertanggungjawab untuk menangani masalah itu. Misalkan untuk pembahasan undang-undang yang diajak ke press room itu adalah ketua Pansusnya, atau bahkan Ketua dpr.
- Tanya : mudah atau tidak menghubungi pejabat terkait untuk informasi tambahan?
- Jawab : kalau untuk pemberitaan sendiri tempat kerja mereka sudah ada di lantai duasemua orang sudah tahu itu. Jadi fleksible memang toh mereka juga punya no hp masing-masing. Tapi itu tadi kalau teman-teman punya keluhan atau keinginan mereka lebih sering menghubungi yang terdekat. Yang terdekat itu siapa? Ya pengurus press room. Ada beberapa sat-dua yang langsung ke pemberitaan.
- Tanya : kalau selama ini ada kesulitan untuk informasi tambahan dari pejabat humas atau pemberitaan?
- Jawab : selama ini nggak masalah.
- Tanya : jadi nggak bisa mengharapkan mereka menjadi the first hand?
- Jawab : mereka bukan the first hand, mereka hanya mediator. Jadi jangan salah itu. Kecuali hal-hal yang terkait dengan bidang mereka, misalnya birokrasi. Ini rumah mereka gitu ya, mereka langsung jadi sumber yang pertama. Jadi harus dibedakan dulu cara kerja wartawan, bagaimana wilayah-wilayah kerja mereka beda dengan di brokrasi.

positif. Citra positif itu muncul dari sebuah konggusi. Ketika elemen-elemen itu memang punya kinerja bagus. Tapi katakanlah dari sejumlah elemaen itu ada satu elemen yang istilahnya negatif maka citra dari elemen-elemen itu akan tergerus dengan kinerja negatif yang dilakukan oleh salah satu elemen. Kan begini, 500 anggota, dua, tiga orang anggota korup tertangkap tangan, maka kinerja yang panjang itu akan terhapus dengan kasus-kasus dua tiga orang itu.

Tanya : jadi seperti Nila setitik susu rusak susu sebelanga.

Jawab : begitulah. Dan paradigma pers kita kan masih bad news is a news. Jadi bukan good news is a news, kan seharusnya begitu. Berita baik berita juga.

Tanya : Tapi mungkin nggak kalau misalnya tadinya fungsinya fasilitator ke depannya tuh..

Jawab : Ya bisa aja, tapi kan prasyaratnya kan banyak, lebih berperan lebih besar lagi. Bisa aja, kenapa nggak. Cuma prasyarat ke situ kan nggak gampang. Misalnya peningkatan SDM, terus kemudian kinerja yang lebih keras lagi, lebih ekstra.

Tanya : tadi kan kalau pengetahuan dari anggota sendiri bahwa ini bawa partai, ini bawa lembaga. Sekarang ini kan berbenturan.

Jawab : nah itu, nggak gampang juga peran pemberitaan itu. Karena yang namanya lembaga politik kan, tarik-menarik politik, kencang kan. Dpr kan lembaga politik. Sementara para anggotanya sendiri para pemain politik kan. Ini semua ingin menonjolkan diri sendiri kan, saling benturan satu dengan yang lain. Nah ini begitu, namanya politik kan permainannya luar biasa. Jadi bagaimana caranya saya bisa muncul dengan menjatuhkan lawan saya.

Tanya : kalau begitu persepsi saudara sendiri tentang aktifitas media relations dpr bagaimana?

Jawab : jadi kalau saya mau memberi saran itu artinya begini, bisa saja peran-peran dari Biro-biro yang harusnya menjalankan fungsi sebagai PR itu untuk lebih mensupport apa yang dibutuhkan oleh wartawan. Support itu dalam arti luas. Itu bisa support informasi, support fasilitas yang lebih memadai. Memang kita sudah dipersiapkan pres room yang baru. Tapi masih ada beberapa kelemahan-kelemahan yang membuat kita menjadi kurang nyaman. Misalkan disainnya kenapa tempatnya agak jauh, kalau dibandingkan tempat yang sekarang ini. Mejanya disainnya atau tempatnya yang kurang nyaman ketika kita untuk konferensi pers. Itu juga menuntut adanya peningkatan kinerja karyawan biro humas dan bagian pemberitaan. Mereka harus lebih tau dari wartawan. Harusnya begitu, kalau wartawan mau menanyakan tentang informasi atau kasus A misalnya dia sudah lebih tau. Jadi kan enak kita, mereka bisa mereferensi kira-kira untuk lebih lanjut ini nara sumbernya si A, si B, atau si C anggota dpr ini.. ini. Kan enak begitu, iya kan? Jadi perannya itu lebih signifikan di dalam memberikan kail-kail informasi. Jadi sebagai agensi yang bisa

mempunyai agenda-agenda sendiri. Agenda-agenda publikasi, agenda untuk konferensi pers. Yang jelas sih saling melengkapi aja. Kan seperti di awal, saya katakan kebutuhan wartawan atas informasi itu beragam. Jadi jangan disamakan antara apa.. satu media harus muat dengan media yang lain atas sebuah informasi. Jadi misalnya kita membahas tentang RUU Susduk jangan berharap bahwa semua media besoknya nanti akan memuat informasi atau berita yang sama terkait dengan RUU Susduk dengan satu angle, dengan angle yang sama. Bisa jadi akan dimuat memang beritanya tentang RUU Susduk tetapi anglenya beda-beda, ada yang nyerang, ada yang pro, ada yang kontra.

Tanya : ada yang di depan, ada yang di belakang..

Jawab : iya, gitu lho.

Tanya : nggak bisa kita arahkan..

Jawab : nggak bisa diarahkan ke sana, diarahkan ke sini. Jangan kan bagian pemberitaan ya. Yang itu adalah relatif terpisah karena dia mitra kan. Kita sendiri yang satu komunitas, karena kita juga sama-sama wartawan, nggak bisa. Anda harus muat ya.., anda harus bikin ini.., anglenya seperti ini.., nggak bisa. Karena mereka punya kebijakan masing-masing, policy masing-masing, organisasi media yang masing-masing berbeda.

Atau kapasitasnya itu kurang maksimal menjadi nara sumber, itu dia akan mewakili biasanya. Tapi biasanya orang yang terpilih sebagai ketua komisi, badan-badan itu adalah orang-orang yang punya kepiawaian.

Tanya : kalau misalnya ketua delegasi?

Jawab : delegasi apa dulu.

Tanya : misalnya delegasi kunjungan kerja, jadi juru bicara untuk mengkonfirmasi berita..

Jawab : Oo misalnya ketua delegasi mau studi banding atau apa? Begitu?

Tanya : lalu membuat laporan atau membuat konferensi pers lah untuk menclarekan berita-berita miring itu. Ternyata ketua delegasinya kurang mempunyai kapasitas meskipun kredibilitasnya bagus. Itu mensiasatnya bagaimana?

Jawab : Jadi begini, kalau dari media ya. Saya nggak tau juga dari persepsi mereka, saya dari persepsi saya sebagai media. Karena kapasitas dia sebagai ketua itu adalah jurubicara. Terlepas apa dia punya kapsotas atau tidak, menyampaikan message, menyanpaikan informasi. Tapi karena kita melihat dia adalah ketua, posisi dia yang mewakili untuk kelompoknya, itu yang kita ambil sebagai nara sumber sebagai kita kutip. Nggak perlu apa yang dikatakannya itu berbobot atau nggak .

Tanya : nanti kalau tidak berbobot akhirnya beritanya nggak masuk?

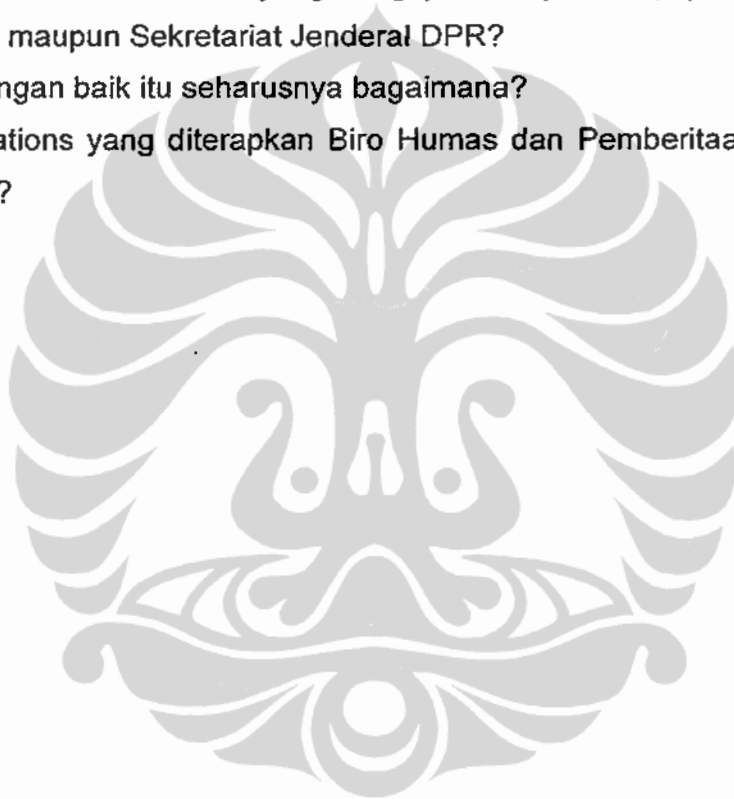


## Lampiran 7

### Pedoman Wawancara

Nara Sumber: Wartawan Koordinator DPR

1. Menurut saudara, bagaimana dengan informasi yang diberikan oleh bagian pemberitaan?
2. Menurut saudara, bagaimana dengan aktivitas media relations DPR?
3. Menurut saudara, apakah ada informasi yang sengaja ditutupi oleh pejabat terkait, baik dari Dewan maupun Sekretariat Jenderal DPR?
4. Menurut saudara, hubungan baik itu seharusnya bagaimana?
5. Jadi strategi media relations yang diterapkan Biro Humas dan Pemberitaan sudah jalan atau belum?



komunikasi yang mengharuskan bahwa wartawan harus memuat, wartawan harus... pokoknya dia ngadain acara di situ, begitu aja .

Tanya : Adakah informasi yang ditutupi? Misalnya sebagai tempat mencari informasi tambahan.

Jawab : Sebenarnya untuk menghidupi humas mereka seharusnya seperti itu. Karena yang dicari wartawan itu kadang - kadang rahasia justru yang rahasia itulah sebenarnya yang harus dicari, yang diinformasikan humas kepada wartawan supaya ada komunikasi yang intens. Tapi kan nggak.. mereka pastikan takut menginformasikan misalnya kebobrokan yang ada di sini atau mungkin humas inikan sering diajak kemana - mana kalau mereka sebagai PR yang baik sebuah lembaga untuk memperbaiki lembaga mereka ini kan selalu ikut misalnya kunjungan kerja mereka ikut kunjungan kerja artinya kan mereka tahu perilaku anggota DPR perorangan atau kelompok komisi yang tahu mungkin ada penyimpangan nah kalau mereka menjadi PR yang baik diinformasikan kepada wartawan itu untuk membangun citra yang baik tapi kan mereka tidak punya keberanian karena itu tadi tidak punya dalam posisi yang sama karena DPR, departemen lembaga setjen di sini apalagi humasnya. Mereka pasti takut.

Tanya : Menurut saudara hubungan baik yang seharusnya seperti apa?

Jawab : Hubungan baik itu menurut saya mestinya mereka saling mengisi misalnya kita butuh humas sebagai perwakilan lembaga yang mempunyai informasi mereka memberikan informasi kepada kita. Kita ingin berhubungan dengan sekjen pun kita jarang - jarang tanya ke humas kan? Karena humas nggak mungkin, kadang-kadang nggak berani. Tapi kalau departemen nggak departemen punya juru bicara di sini kan nggak ada juru bicara. Misalnya kalau humas itu sebagai jurubi cara mereka bisa ngomong misalnya tentang soal cincin katakanlah humas mempunyai pemahaman yang banyak tentang cincin, di sini kan nggak kita bisa langsung ke sekjen kita bisa tanya pak Agung Laksono. Saya nggak tahu humas di sini jangan - jangan malah nggak tahu, takut malah jadi PR yang baik itu seimbang. Kalau mereka menguasai saya yakin artinya soal cincin misalnya orang humas menguasai sekali menjadi juru bicara menerangkan ini lho soal cincin itu begini. Pasti suatu saat dia diposisikan oleh media maupun oleh lembaganya dalam posisi yang baik. Dalam posisi yang seimbang. Tapi kalau seperti sekarang pasif itu sulit mewujudkan menjadi humas yang baik PR yang baik nggak bakalan bisa.

Tanya : Jadi tidak hanya masalah ketidakadilan informasi, karena sistimnya begitu?

Jawab : Sistim juga mungkin dari SDM-nya juga tapi yang paling utama sistim ini memang membentuk seorang kabag humas atau kepala biro humas menjadi corong departemen yang tidak boleh mempunyai

teman - teman yang lain. Ketika orang bingung cari bahan, mereka harus ada. Itu dari sisi ketersediaan data aja. Belum dari sisi.. di sini kan nggak ada kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehumasan. Itu bukan belajar dari lapangan, tapi mereka teks book bahwa ini begini.. begini, nggak ada itu, situasi itu berkembang. Jadi nggak ada mereka harus membina hubungan baik, mereka harus menguasai ketika mereka perlu data harus menyediakan, ini websitenya harus di *up-date* terus, sehingga data-data itu lengkap, disini kan nggak karena faktor-faktor proyek itu juga jadi masalah justru menghambat mereka. Jadi itu yang bagian dari yang tertutup, tapi yang terbuka apa yang bisa diharapkan... nggak ada, hampir nggak ada.

Itu yang saya lihat. Saya pernah menjadi pengurus jadi saya agak tahulah. Karena saya pernah berhubungan dengan atas seperti apa.

Tanya : Jadi kesimpulannya *media relations* tidak jalan mas?

Jawab : Sebenarnya tidak jalan. Kalau dibilang tidak jalan secara normal sesungguhnya, di sini itu tidak, tidak jalan. Humas di sini itu memang... mungkin karena karakter yang berbeda, satu. Karakter yang berbeda itu dalam arti kalau departemen kan humas itu memang corongnya... corong betul. Sementara di sini tidak menjadi corong anggota DPR. Bahkan corong sekjen pun tidak. Yang kedua, yaitu selain sistim terus kemudian kualitas. Saya udah begini aja bisa kok, begini aja jalan, mandeg semua.

Jadi untuk mengembangkan PR yang efektif di sini, ya itu tadi sistimnya... sistim itu sulit, karena sistim birokrasi itu kan memang baku ya. Satu-satunya cara yang bisa merubah itu adalah meningkatkan kualitas SDM. Bagaimana caranya? Ya.. mereka harus mengubah dirinya sendiri, penguasaan mereka, penguasaan tentang data, misalnya. Ya itu tadi yang paling gampang ajalah ya, ketika kadang-kadang kita susah cari data, di sini ada, itu satu. Ketika sulit, misalnya sekarang ini yang sedang ngetrend tentang cincin, di sini humasnya ada lengkap, ini pak. Data lengkap dan orang sekjen juga harus mengaku bahwa ini ujung tombak, tidak semuanya harus berhubungan dengan sekjen. Datanya ada lengkap di sana, dari situ dia bener-bener jadi jurubicara, juru bicara dalam arti teknis tidak semuanya. Kalau untuk soal anggota dpr, mungkin anggota dpr bisa sendir-sendiri. Tapi hal-hal yang teknis soal cincin, soal pemeliharaan gedung, sekarang kita kan masih seperti itu. Apalagi kalau dia menguasai soal teknis DPR. O DPR itu begini, misalnya mekanisme siding itu seperti ini, jadi nanti begini, masalah undang-undang dia menguasai. UU yang ada sekarang berapa, yang belum disahkan berapa, yang jadi prioritas berapa, saya kira mereka harus menguasai

Tanya : Kalau mba sendiri, apa yang dirasakan terhadap *press gathering*, apa ada manfaatnya?

Jawab : Manfaatnya yang saya rasakan hanya sekedar bentuk silaturahmi, karena di luar itu kan kita nggak ngebahas berita atau apa, Cuma silaturahmi doing. Kayak outing - outing gitu.

Tanya : *Say hello* tidak dia?

Jawab : Orang pemberitaannya..ya iya.

Tanya : Berarti masalah distribusi data yang kurang ya?

Jawab : Tergantung masalah data. Tergantung orangnya sih mas, tiap - tiap komisi kan tergantung orangnya, ya tergantung koneksi juga.

Tanya : Pernah nggak merasa kesulitan memperoleh informasi lewat telepon?

Jawab : Nggak sih.

Jawab : Saya kan TV swara yang mempunyai kerja sama dengan TV parlemen, yang punya bagian pemberitaan, jadi saya gampang - gampang aja. Beberapa teman saya menemukan kendala, misalnya bahan rapat

- c. Bekerjasama dengan RRI setiap hari Jumat Jam 10.00 – 11.00 mengadakan siaran langsung “Bersama Wakil Rakyat” mengangkat topic-topik menarik dengan nara sumber Anggota DPR dan didampingi dari Pengamat, Pejabat Instansi Pemerintah atau nara sumber lainnya yang terkait dengan topik yang diangkat.
- d. Bekerjasama dengan TV One nama acara Pariwara Parlemen.
- e. Bekerjasama dengan TVRI nama acara Kafe Kata
- f. Bekerjasama dengan Metro TV rutin mengisi acara Public Corner
- g. Bekerja sama dengan AN TV
- h. Bekerja sama dengan TPI
- i. Bloking halaman untuk advetorial di Koran Tempo
- j. Bloking halaman untuk advertorial di Republika
- k. Bloking halaman untuk advertorial Media Indonesia
- l. Menerbitkan majalah yang terbit dwi bulanan.
- m. Menerbitkan Bulletin yang terbit setiap minggu.

Jawaban Nomor 3 :

Bagian Pemberitaan selalu membangun kerjasama selain dengan wartawan, juga dengan humas-humas instansi pemerintah atau organisasi lainnya yang terkait dengan tugas kehumasan. Hubungan ini dapat lebih erat kita lakukan dengan humas dari instansi lain, terutama saat kunjungan kerja ke berbagai daerah saat masa reses anggota.

Selain itu, juga dengan Pemimpin Redaksi berbagai media massa baik cetak, maupun elektronik agar kerjasama ini terbangun dengan baik.

Bagian Pemberitaan juga rutin mengikuti acara Bako Humas yang diselenggarakan tiap-tiap instansi untuk dapat menimba pengalaman dari hasil diskusi saat acara berlangsung.